

**TUGAS AKHIR KARYA ILMIAH**  
**PERAN HUMAS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)**  
**DALAM MERAH PENGHARGAAN *BEST OF GOVERNMENT***  
**PADA AJANG *TEROPONG PUBLIC RELATIONS AWARD 2020***



**TUGAS AKHIR KARYA ILMIAH**  
Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya

Oleh :

**NOVIANTI MUTIARA PUTRI**

**1408518085**

**PROGRAM STUDI D-III HUBUNGAN MASYARAKAT**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**Juli**

**2021**

**Novianti Mutiara Putri (1408518085), TUGAS AKHIR KARYA ILMIAH PERAN HUMAS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM MERAH PENGHARGAAN *BEST OF GOVERNMENT* PADA AJANG TEROPONG *PUBLIC RELATIONS AWARD 2020*, Tugas Akhir Karya Ilmiah, 2021; hal 61; lamp 6; Ref 8 bk: 2002-2020, 10 jurnal, 2 situs.**

## **ABSTRAK**

Dalam meraih penghargaan *best of government*, Humas BPK RI berupaya untuk menjalankan perannya dalam berhubungan baik dengan media maupun publik. humas BPK RI juga berupaya untuk menyampaikan informasi yang transparan kepada publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Humas BPK RI dalam meraih penghargaan *best of government* pada ajang *Teropong Public Relations Award 2020*.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori mengenai peran humas yang terdiri dari teknisi komunikasi, *expert prescriber*, fasilitator komunikasi, fasilitator pemecah masalah yang dikemukakan oleh Dozier & Broom.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sumber data primer meliputi wawancara mendalam dan sumber data sekunder yang meliputi dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan penulis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Uji keabsahan data yang dilakukan oleh penulis yaitu triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam meraih penghargaan *best of government*, Humas BPK RI menjalankan peranan sebagai fasilitator komunikasi, fasilitator pemecah masalah, dan teknisi komunikasi. Namun Humas BPK RI tidak berperan sebagai *expert prescriber*, karena segala keputusan secara aktif berada di Pimpinan BPK dan Sekretaris Jendral, dan humas tidak turut serta di dalamnya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Humas BPK RI menjalankan perannya sebagai fasilitator komunikasi, fasilitator pemecah masalah, dan teknisi komunikasi dengan memanfaatkan E-PPID dalam penyampaian informasi kepada Publik secara transparan. Namun Humas BPK RI tidak berperan sebagai *expert prescriber*, karena humas BPK RI tidak berperan aktif dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci : Peran Humas; Penghargaan; Humas Pemerintah

**Novianti Mutiara Putri (1408518085), TUGAS AKHIR KARYA ILMIAH PERAN HUMAS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM MERAH PENGHARGAAN *BEST OF GOVERNMENT* PADA AJANG TEROPONG *PUBLIC RELATIONS AWARD 2020*, Tugas Akhir Karya Ilmiah, 2021; pages 61; attachments 6; Ref 8 books: 2002-2020, 10 journals, 2 sites.**

## **ABSTRACT**

In winning the best of government award, BPK RI Public Relations seeks to carry out its role in dealing with both the media and the public. BPK RI public relations also strive to convey transparent information to the public. This study aims to determine the role of BPK RI Public Relations in winning the best of government award at the Binocular Public Relations Award 2020.

The theory used in this study is the theory of the role of public relations consisting of communication technicians, expert prescribers, communication facilitators, problem solving facilitators proposed by Dozier & Broom.

This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques used are the primary data sources include interviews and secondary data sources include documentation and literature study. The data analysis technique used by the author includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data validity test conducted by the author is source triangulation.

Based on the results of the research that in achieving the best award from the government, BPK RI Public Relations performs the roles of communication facilitator, problem solving facilitator, and communication technician. However, BPK RI Public Relations does not act as a prescription expert, because all decisions are actively held by the BPK leadership and the Secretary General, and PR does not participate in them.

The conclusion of this research is that BPK RI Public Relations is used as a communication facilitator, problem solving facilitator, and communication technology by utilizing E-PPID in delivering information transparently. However, BPK RI PR does not act as a prescription expert, because BPK RI PR does not play an active role in decision making.

Keywords : The Role of Public Relations; Award; Government Public Relations.

## LEMBAR ORISINALITAS



### PROGRAM STUDI D-III HUBUNGAN MASYARAKAT

### FAKULTAS ILMU SOSIAL

### UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa Tugas Akhir Karya Ilmiah dengan judul Peran Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Meraih Penghargaan *Best of Government* Pada *Ajang Teropong Public Relations Award 2020* adalah benar-benar hasil karya tulis pribadi dan telah mengikuti aturan sebagaimana yang tertera pada pedoman penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam Tugas Akhir Karya Ilmiah ini maka peneliti sanggup untuk menerima dan menjalankan sanksi yang telah ditentukan.

Jakarta, 9 Juli 2021



**Novianti Mutiara Putri**

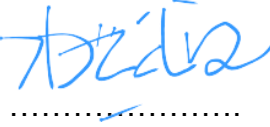
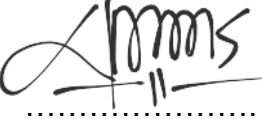
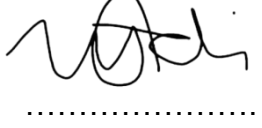
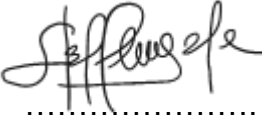
**NIM. 1408518085**

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL PENELITIAN**

**TUGAS AKHIR KARYA ILMIAH**

**NAMA** : Novianti Mutiara Putri  
**NIM** : 1408518085  
**JUDUL** : Peran Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Meraih Penghargaan *Best of Government* Pada Ajang *Teropong Public Relations Award 2020*

**TIM PENGUJI**

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<u>Wina Puspita Sari, M.Si</u> Ketua sidang	 .....	28/07/2021 .....
2.	<u>Asep Soegiarto, M.Si</u> Dosen pembimbing	 .....	28/07/2021 .....
3.	<u>Wasono Adi, MPC</u> Penguji Ahli	 .....	27/07/2021 .....
4.	<u>Abdul Kholik, M.IKOM</u> Sekretaris Sidang	 .....	28/07/2021 .....

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas izin dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Karya Ilmiah (TAKI) yang berjudul “Peran Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Meraih Penghargaan *Best Of Government* Pada Ajang *Teropong Public Relations Award 2020*” sebagai persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya di Program Studi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Penulis turut mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Prawoto dan Ibu Suheti selaku orang tua dari penulis yang senantiasa memberikan dukungan penuh kepada penulis.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir Karya Ilmiah ini, penulis menyadari bahwa terselesaikannya penelitian ini turut melibatkan berbagai pihak yang ikut membantu, membimbing, dan memberikan dukungan. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Komarudin, M.Si, selaku pelaksana tugas Rektor Universitas Negeri Jakarta
2. Prof. Dr. Sarkadi, M.Si, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta

3. Asep Soegiarto, M.Si, sebagai Koordinator Program Studi D3 Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
4. Seluruh dosen Program Studi D3 Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
5. Asep Soegiarto, M.Si, sebagai dosen pembimbing Tugas Akhir Karya Ilmiah Semester 114 yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir Karya Ilmiah
6. Trisari Istiati selaku Kepala Subbagian Publikasi dan Media BPK RI yang menjadi keyinforman dalam penelitian ini. Bestantia Indraswati selaku Pranata Hubungan Masyarakat Muda BPK RI dan Rihad Wiranto selaku Pemimpin Redaksi Teropong Senayan yang menjadi informan dalam penelitian ini
7. Rima Kusuma selaku team biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Internasional yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di BPK RI
8. Denny Pramana selaku kakak dari penulis yang memberikan gambaran dalam penulisan Tugas Akhir Karya Ilmiah ini
9. Teman-teman Program Studi Hubungan Masyarakat Angkatan 2018, khususnya kepada Mega Annisa Ramadhany, Aisyah Nurul Ramadhani, Fitriana Sartiningtias, Aisyah Mutiara, Antini Dwi

Noviranti, Ayu Melliniawati, Eka Nur Aini, Mardiana Mufidah yang sudah menjadi teman baik selama menempuh pendidikan di D3 Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta

10. Teman-teman satu bimbingan yaitu Mega Annisa, Aisyah Nurul, Shandra Fitriani, Sheva Tiarasari, Talitha Zahra, Shelfi Anggraini, Sopyan Hadi, Annisa Nadya, Syawalia Putri, Kaimala Zuarni, Hana Nabilah, Verra Andriyani, Rizhal Ardiansyah, dan Rivo Anderas yang telah membantu, berdiskusi, dan saling mendukung satu sama lain

11. Teman-teman BEM-P Humas yang telah memberikan dukungan penuh dan memberikan kesempatan untuk tubuh dan berkembang bersama

12. Orang-orang yang penulis sayangi di luar kampus, khususnya kepada Fajri Septian, Malida Alviva, Rahma Anggraini, Hera Cahya Ananda, Kartika meynisa, Aprilia Salvianti, Salwa Pritiani, grhacella Putri, Annisa Fahira yang selalu memberikan dukungan dan selalu ada dikala sedih maupun senang

13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir Karya Ilmiah ini

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir Karya Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati



penulis menerima apabila terdapat kritik, masukan, dan saran demi tercapainya penulisan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Penulis berharap semoga Tugas Akhir Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca, praktisi kehumasan, dan khususnya bagi penulis untuk menambah wawasan pengetahuan dalam dunia kehumasan.

Jakarta, 9 Juli 2021

Novianti Mutiara Putri

NIM. 1408518085

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
1.4.1. Manfaat Akademis .....	5
1.4.2. Manfaat Praktis .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1. Penelitian yang Relevan .....	6
2.2. Deskripsi Teori .....	9
2.2.1. <i>Public Relations</i> .....	9
2.2.2. Peran Humas .....	13
2.2.3. Penghargaan <i>Best of Government</i> .....	15
2.3. Keterkaitan Antar Konsep .....	17

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	19
3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian .....	19
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian .....	21
3.3. Subjek Penelitian .....	21
3.4. Teknik Keabsahan Data.....	22
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.5.1. Sumber Data Primer .....	24
3.5.1.1. Wawancara .....	24
3.5.2. Sumber Data Sekunder .....	25
3.5.2.1. Dokumentasi.....	25
3.5.2.2. Studi Pustaka.....	26
3.6. Teknik Analisis Data.....	27
3.7. Keterbatasan Penelitian .....	29
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 30
4.1. Obyek Penelitian .....	30
4.1.1. Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).....	30
4.1.2. Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia .....	33
4.1.3. Profil Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama International Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.....	33
4.2. Hasil Penelitian .....	35
4.2.1. Peran Humas Dalam Meraih Penghargaan Best of Government .....	37
4.2.1.1. <i>Expert Prescriber</i> .....	37

4.2.1.2.	Fasilitator Komunikasi .....	38
4.2.1.3.	Fasilitator Pemecah Masalah .....	40
4.2.1.4.	Teknisi Komunikasi .....	42
4.3.	Pembahasan Hasil Penelitian .....	44
4.3.1.	<i>Expert prescriber</i> .....	44
4.3.2.	Fasilitator Komunikasi .....	45
4.3.3.	Fasilitator Pemecah Masalah .....	47
4.3.4.	Teknisi Komunikasi.....	48
4.4.	Triangulasi Sumber .....	49
BAB V PENUTUP .....		56
5.1.	Kesimpulan .....	56
5.2.	Saran .....	57
DAFTAR PUSTAKA.....		58
LAMPIRAN .....		xv

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keyinforman.....	35
Tabel 2 Informan.....	35
Tabel 3 Tabulasi Perbandingan Hasil Wawancara Peran Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Meraih Penghargaan <i>Best of Government</i> pada Ajang <i>Teropong Public Relations Award 2020</i> .....	49

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Berita Mengenai Penghargaan Yang Diterima BPK RI ..... 1

## DAFTAR LAMPIRAN

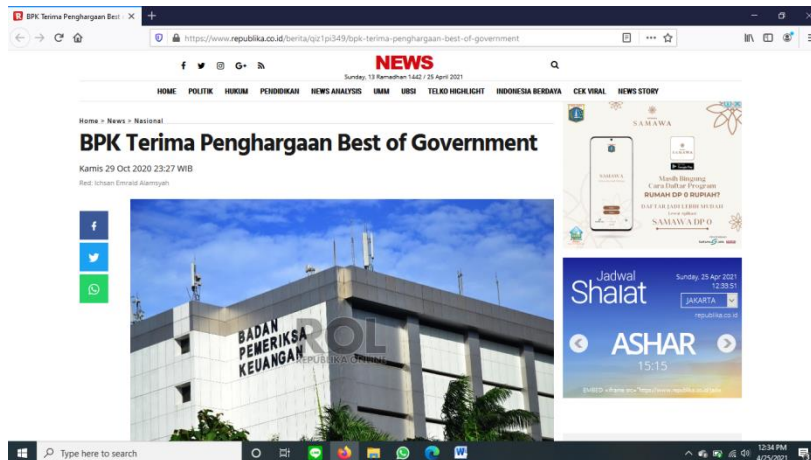
Lampiran 1 Transkrip Wawancara Key Informan.....	xvi
Lampiran 2 Transkrip Wawancara Informan I.....	xxvii
Lampiran 3 Transkrip Wawancara Informan II.....	xxxv
Lampiran 4 Bukti Wawancara.....	xli
Lampiran 5 Absensi Bimbingan.....	xlii
Lampiran 6 Riwayat Hidup.....	xliv

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Semakin berkembangnya teknologi, banyak instansi yang memanfaatkan era digital ini untuk turut mengembangkan instansi yang dikelolanya, tidak terkecuali instansi pemerintah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dikenal sebagai instansi pemerintahan yang bergerak dibidang keuangan, BPK RI memiliki peranan untuk memeriksa keuangan negara. Hal ini tentu menjadi tugas yang besar bagi Humas BPK RI untuk mendapatkan kepercayaan publik.



**Gambar 1** Berita Mengenai Penghargaan Yang Diterima BPK RI

**Sumber : [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) (Alamsyah, 2020)**



Pada tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mendapatkan sebuah penghargaan *Best of Government* di ajang *Teropong Public Relations Award*. Penghargaan ini tentu menjadi sebuah pengakuan bahwa BPK RI berhasil menjadi instansi pemerintah terbaik. Tidak hanya itu, penghargaan ini juga baik untuk eksistensi BPK RI yang dikenal sebagai instansi keuangan yang dipercayakan oleh pemerintah.

Penghargaan yang didapat oleh BPK RI, tidak lain karena kerjakeras seluruh komponen yang ada di dalamnya, termasuk peran biro Hubungan Masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam terwujudnya penghargaan ini. Sebagai seorang praktisi humas, tidak semata-mata hanya untuk menjalin hubungan baik dengan *stakeholder*. Namun seorang humas juga memiliki peran yang kompleks untuk bertindak sebagai teknisi PR atau manajer PR, dimana peran manajer PR ini di dalamnya terbagi menjadi beberapa peranan seperti *expert prescriber*, fasilitator komunikasi, fasilitator pemecah masalah. Sedangkan teknisi PR mencakup peran sebagai teknisi komunikasi.

*Teropong Public Relations Award 2020* merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Teropong Senayan sebagai Portal Berita, dimana kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak enam kali dengan kategori yang berbeda yaitu *Teropong Parlemen Award 2020*, *Teropong Democracy Award 2020*, *Teropong Insurance Award 2020*, *Teropong CSR Award 2020*, *Teropong Leadership Award 2020*. Kegiatan *Teropong Public Relations*

*Awards* ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada peran dan fungsi *Public Relations* dalam menunjang kinerjanya di sebuah institusi maupun perusahaan. Ada beberapa kategori penghargaan yang diberikan diantaranya yaitu *Best Active Social Media*, *Best Use of Digital Innovation*, *Best CSR of Communication*, *Best of Media Relation*, *Best Appearance Online and Print Media*, *Best Community Engagement*, *Best of Government*, dan *PR of the Year*.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mendapatkan penghargaan pada kategori *Best of Government*, dimana BPK RI telah berhasil memenangkan kategori tersebut bersama dengan dua instansi lainnya yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam mendapatkan penghargaan ini, instansi pemerintahan yang berhasil menang telah diseleksi dengan berbagai instansi pemerintahan lainnya di Indonesia, dimana dalam proses seleksi para juri melihat kinerja *public relations* dan memantau pemberitaan mengenai instansi tersebut. Penghargaan yang didapatkan ini tentunya atas kinerja seluruh komponen Badan Pemeriksa keuangan serta seorang humas yang berperan di dalamnya.

Dalam memenangkan kategori *Best Government* ini ada beberapa Indikator penilaian yang harus dimiliki oleh suatu instansi yaitu dapat menyampaikan informasi atau pesan kepada masyarakat secara transparan

dan efektif, terbuka dan dekat dengan media, transparan dan kemudahan dalam akses informasi. Indikator penilaian ini yang menjadi fokus penulis untuk mengetahui peran humas BPK RI yang dijalankan yang berkaitan dengan indikator penilaian tersebut.

Penelitian yang dilakukan penulis, dimaksudkan untuk mengetahui apakah humas BPK RI menjalankan peranannya sesuai dengan indikator penilaian yang ada dalam penilaian penghargaan kategori *best of government* pada ajang *Teropong Public Relations 2020* yang menekankan pada penyampaian informasi yang terbuka dan transparan.

Peran seorang praktisi humas memang memiliki pengaruh yang kompleks dalam keberlangsungan suatu instansi. Untuk itu, penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian tentang peran seorang humas di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Maka penulis menetapkan judul penelitian “Peran Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Meraih Penghargaan *Best Of Government* Pada Ajang *Teropong Public Relations Award 2020*.”

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, adapun rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan yaitu “Bagaimana peran humas Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam meraih penghargaan *Best of Government* pada Ajang *Teropong Public Relations Award 2020?*"

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam meraih penghargaan *Best of Government* pada Ajang *Teropong Public Relations Award 2020*.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu di bidang Hubungan Masyarakat, khususnya mengenai peran praktisi humas di instansi pemerintah.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk praktisi *Public Relations* dalam menjalankan perannya sebagai seorang humas.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian yang Relevan**

Dalam mendukung penelitian yang dilakukan, peneliti membandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema yang hampir sama dengan topik yang peneliti ambil untuk diteliti. Penelitian terdahulu bermanfaat untuk membantu peneliti dalam melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini berguna bagi peneliti untuk mengetahui teori-teori yang digunakan serta membantu peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai Peran Humas. Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai referensi dalam melakukan penelitian :

1. Jurnal penelitian yang berjudul “Fungsi Dan Peran Humas Di Lembaga Pendidikan” ditulis oleh Wina Puspita Sari dan Asep Soegiarto pada tahun 2019, tenaga pengajar di Program Studi Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini yaitu untuk mengetahui fungsi dan peran humas di lembaga pendidikan. Pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdapat dua kategori yaitu data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan data sekunder yang diperoleh dari data yang sudah ada melalui publikasi atau informasi yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Penelitian ini dilakukan di tiga tempat yang berbeda yaitu SMAN 77 Jakarta, SMK Diponegoro, SMAN 3 Jakarta. Hasil dari penelitian ini yaitu peran dan fungsi humas di tiga tempat tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda, karena ada beberapa yang merangkap menjadi humas dari bagian lain, ada pula yang sudah memiliki bagian humas yang berdiri sendiri (Sari & Soegiarto, 2019).

2. Skripsi yang berjudul, "Peran Humas Dalam Menyebarluaskan Pembangunan Disektor Pariwisata Kabupaten Bantaeng" ditulis oleh Jabal Rahmat pada tahun 2018, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Humas Dalam Menyebarluaskan Pembangunan di Sektor Pariwisata Kabupaten Bantaeng. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang diambil yaitu deksriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu peran humas dalam menyebarluaskan pembangunan di

sektor pariwisata Kabupaten Bantaeng yaitu meningkatkan kerjasama dimana berdasarkan hasil wawancara Dinas Pariwisata Bantaeng memiliki cara tersendiri untuk dapat bekerjasama dengan pihak tertentu. Peran lainnya yaitu mengoptimalkan media sosial dimana penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng telah dilakukan dengan baik. Tidak hanya itu, peran humas juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Peran terakhir yaitu membangun citra humas dimana Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng berfokus pada pengembangan pusat destinasi Bantaeng guna menjalin hubungan baik dalam membangun citra positif kepada publiknya (Rahmat, 2018).

3. Jurnal penelitian yang berjudul, “Peran Humas Pemerintah Sebagai Fasilitator Komunikasi Pada Biro Humas PEMPROV Kalimantan Selatan” ditulis oleh Belinda Devi Larasati Siswanto dan Firda Zulivia Abraham pada tahun 2016, Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari peran fasilitator komunikasi pada Humas PEMPROV Kalimantan Selatan. Pada penelitian ini, Jenis penelitian yang diambil yaitu studi kasus deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yang

pertama adalah observasi. Peneliti mengamati *website* PEMPROV Kalimantan Selatan serta media online yang meliputi *facebook* dan *twitter*. Sumber data kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi yang berasal dari Internal Biro Humas dan Eksternal Biro Humas PEMPROV Kalimantan Selatan. Hasil dari penelitian ini yaitu peran Biro Humas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai fasilitator komunikasi masih belum dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih kurangnya informasi dan dokumentasi yang masih sulit untuk diakses oleh masyarakat (Siswanto & Abraham, 2016).

## **2.2. Deskripsi Teori**

### **2.2.1. *Public Relations***

Menurut J.C. Seidel dan W. Emerson Rech menjelaskan bahwa *Public Relations* merupakan proses yang berkesinambungan, seni menanamkan suatu rencana dan sebagainya (Sr. Maria Assumpta Rumanti OSF, 2002, p. 11). Dari pengertian *public relations* yang dikemukakan oleh Ahli, penulis menyimpulkan bahwa seorang praktisi humas pada dasarnya harus dapat menyusun rencana atau strategi guna mencapai tujuan yang instansi inginkan. Bagian divisi hubungan masyarakat diperlukan disetiap instansi



dengan tugas-tugas yang biasanya berhubungan langsung dengan publiknya.

Tugas seorang *Public Relations* diantaranya yaitu :

- a. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi secara lisan, tertulis, atau melalui gambar kepada publik
- b. Memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum atau masyarakat
- c. Memperbaiki citra organisasi
- d. Tanggung jawab sosial
- e. Komunikasi (Sr. Maria Assumpta Rumanti OSF, 2002, p. 39).

Dalam suatu instansi atau perusahaan, seorang *Public Relations* dibutuhkan untuk dapat menjalankan kegiatan-kegiatan kehumasan untuk mencapai tujuan dari suatu instansi atau perusahaan. Adanya seorang praktisi humas dalam sebuah instansi, memiliki tujuannya tersendiri. Menurut Frida Kusumastuti (2002:20), terdapat tiga tujuan *public relations*, diantaranya yaitu :

- a. Terpeliharanya saling pengertian

Rasa saling pengertian ini perlu dibangun antara instansi dengan publiknya agar instansi dapat memahami karakteristik dari publiknya, begitupun sebaliknya.

- b. Menjaga dan membentuk saling percaya

Dalam menjaga rasa kepercayaan publik terhadap instansinya, perlu adanya kedekatan yang dibangun oleh seorang praktisi humas agar terciptanya rasa saling percaya.

c. Memelihara dan menciptakan kerjasama

Dalam menjalin kerjasama, merupakan tujuan seorang praktisi humas yang perlu dicapai. Dengan adanya kerjasama, akan berdampak baik pada keberlangsungan suatu perusahaan atau instansi. Dibalik tercapainya kerjasama, ada praktisi humas yang berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan *stakeholders* (Ira Dwi Rahayu, n.d., p. 12).

Oemi Aburrachman (1995: 34) membagi hubungan masyarakat kedalam dua bentuk yaitu :

1. *Internal Public Relations* yaitu sekelompok orang bekerja didalam suatu organisasi.
2. *External Public Relations* yaitu komunikasi yang dijalin dengan kelompok orang-orang diluar organisasi, masyarakat dan pemerintah (Rahayu, 2014, p. 14).

Dalam melaksanakan tugasnya, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang humas di suatu perusahaan atau instansi. Kegiatan

ini bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi, diantaranya yaitu:

1. Mendefinisikan masalah (atau peluang)

Dalam tahapan ini, seorang praktisi humas bertugas untuk melakukan penyelidikan dan memantau pengetahuan, opini, sikap, dan perilaku dari pihak terkait dan biasanya dipengaruhi oleh kebijakan dari organisasi.

2. Perencanaan dan pemrograman

Pada tahapan ini, seorang praktisi humas akan mempertimbangkan temuannya pada tahap pertama dalam membuat kebijakan atau program dari organisasi.

3. Mengambil tindakan dan berkomunikasi

Di tahap ini, seorang praktisi humas akan mengimplementasikan program berupa aksi dan komunikasi, guna untuk mencapai tujuan spesifik dari masing-masing publik untuk mencapai tujuan program.

4. Mengevaluasi program

Di tahap terakhir ini, seorang praktisi humas akan melakukan penilaian atau evaluasi atas persiapan, implementasi, dan hasil dari suatu program yang telah dilakukan (Cutlip, Op.cit., *Effective Public Relations*, 320).

Dari penjabaran tentang teori *Public Relations*, keterkaitan antara teori yang diambil dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu seorang praktisi humas dalam menjalankan peranannya, perlu untuk mengetahui apa saja tujuan dan tugasnya, siapa publiknya, dan bagaimana cara untuk mengatasi suatu masalah.

### **2.2.2. Peran Humas**

Di dalam suatu instansi, tentunya seorang praktisi humas sangat berperan untuk keberlangsungan instansi tersebut. Peran seorang praktisi humas memiliki pengaruh yang besar atas meningkatnya citra suatu instansi. Hal ini karena seorang humas yang biasanya memiliki hubungan yang lebih dekat dengan publiknya, sehingga seorang humas tahu opini apa yang melekat di benak publik. Untuk itu, penting bagi seorang humas pemerintah untuk dapat meningkatkan eksistensi suatu instansi guna mendapatkan kepercayaan publik. Menurut Dozier & Broom, terdapat empat peran humas yang harus dimiliki, diantaranya yaitu:

- a. *Expert Prescriber*, yang memiliki tugas untuk membantu perusahaan atau organisasi dalam mencari jalan keluar dari penyelesaian masalah dengan publiknya
- b. *Communication Fasilitator*, PRO (*Public Relations Officer*), pada peran ini, seorang humas bertindak sebagai fasilitator atau mediator yang

berguna untuk membantu pihak manajemen sebagai pendengar untuk mengetahui apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya.

- c. *Problem solving process fasilitator*, memiliki tugas untuk membantu pimpinan organisasi yang bertindak sebagai penasehat (*adviser*) maupun bertindak sebagai pengambil tindakan eksekusi/keputusan dalam masalah dengan publik
- d. *Communication technician*, bertugas menyediakan layanan teknis komunikasi yang pelaksanaannya tergantung masing-masing level atau bagian, mulai dari pimpinan sampai bawahan (Cutlip, 2006, p. 46).

Turut dikemukakan oleh Dozier & Broom, bahwa peran humas terdiri dari Teknisi PR dan Manajer PR. Dimana Manajer PR meliputi tiga peran lainnya yaitu *expert prescriber*, fasilitator komunikasi, dan fasilitator pemecah masalah. Sedangkan Teknisi PR meliputi satu peran yaitu sebagai teknisi komunikasi. Teknisi PR maupun Manajer PR memiliki perannya masing-masing, diantaranya yaitu :

- a. Teknisi PR

Pada peran ini, humas bertindak untuk menggarap soal tulis-menulis, memproduksi, dan menyebarkan informasi. Humas juga akan berfokus pada aktivitas komunikasi dan aktivitas lain dalam proses komunikasi, yang mana peran ini biasanya bukan termasuk

pada bagian manajemen. Tugas-tugas yang meliputi peran ini yaitu membuat press release, membuat pidato, mengurus *website*, membuat laporan tahunan, berkomunikasi dengan media, menjalin hubungan dengan media (Cutlip, 2006, p. 49).

b. Manajer PR

Pada peran ini dibutuhkan keahlian riset, minat pada pemikiran strategis, dan tendensi untuk berpikir dari segi hasil atau dampak dari aktivitas PR. Manajer PR ini juga bertugas dalam pembentukan koalisi, negosiasi, manajemen isu, evaluasi program, serta konseling manajemen (Cutlip, 2006, p. 49).

### **2.2.3. Penghargaan *Best of Government***

Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu instansi, tentunya tidak lepas dari kerjasama seluruh komponen yang ada di dalam instansi tersebut. Kerjasama yang terjalin dalam internal suatu instansi ini lah yang perlu terus dibangun agar tujuan-tujuan dari suatu instansi dapat tercapai.

Bagi suatu instansi, mendapatkan sebuah penghargaan dapat dijadikan motivasi untuk terus mengembangkan instansinya menjadi jauh lebih baik lagi. Dari adanya motivasi ini, akan tercipta dorongan yang membuat suatu instansi akan terus mengejar tujuannya hingga mencapai titik

yang sudah ditargetkan. Hal ini yang akan mendorong instansi untuk kembali meraih penghargaan di kemudian hari.

Penghargaan *best of government* yang didapatkan oleh instansi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, merupakan penghargaan pertama yang didapatkan untuk kategori tersebut di ajang *Teropong Public Relations Award 2020*. Ajang yang diadakan oleh Media Teropong Senayan ini adalah tahun pertama yang dilaksanakan yaitu pada tahun 2020 lalu, dimana ajang *Teropong Public Relations Award 2020* merupakan event keenam yang diadakan dan terdapat lima event serupa dengan kategori yang berbeda diantaranya *Teropong Parlemen Award 2020*, *Teropong Democracy Award 2020*, *Teropong Insurance Award 2020*, *Teropong CSR Award 2020*, *Teropong Leadership Award 2020*.

Tidak hanya penghargaan *best of government*, namun ada beberapa kategori lain yang turut diperlombakan dalam ajang tersebut, diantaranya yaitu *Best Active Social Media*, *Best Use of Digital Innovation*, *Best CSR of Communication*, *Best of Media Relation*, *Best Appearance Online and Print Media*, *Best Community Engagement*, *Best of Government*, dan *PR of the Year*. Penghargaan *best of government* ini diberikan kepada tiga instansi terbaik diantaranya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana ketiga instansi pemerintahan yang

memenangkan kategori ini telah diseleksi dengan berbagai instansi pemerintah lainnya yang ada di Indonesia. Penilaian ini dilakukan oleh para juri yang berkompeten dalam bidangnya dengan melihat kinerja *public relations* suatu instansi serta pemberitaan mengenai instansi tersebut.

Penghargaan yang diterima oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Internasional BPK RI ini, merupakan hasil dari kinerja *staff* humas yang terus berupaya untuk menjadikan BPK RI menjadi instansi yang terbaik di Indonesia. Adanya penghargaan *best of government* ini, merupakan bukti bahwa BPK RI telah berhasil menjalankan fungsinya dengan baik untuk masyarakat. Tidak hanya dilihat dari eksistensi BPK RI dimata publik, penilaian dalam menentukan penghargaan ini juga dinilai dari bagaimana humas BPK RI dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat secara transparan dan efektif, hubungan yang terbuka dan dekat dengan media, serta adanya transparansi dan kemudahan dalam akses informasi.

### **2.3. Keterkaitan Antar Konsep**

Peran humas bagi suatu instansi merupakan komponen penting yang harus dimiliki agar tujuan dari suatu instansi dapat tercapai. Adanya bagian humas di suatu instansi tentunya memiliki fungsi tersendiri yang dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan suatu instansi. Fungsi dan peran



merupakan hal yang saling melengkapi bagi seorang humas untuk menjalankan tugasnya.

Peran sebagai *expert prescriber*, fasilitator komunikasi, fasilitator pemecah masalah, dan teknisi komunikasi harus dikuasai oleh seorang praktisi humas, karena peran ini lah yang menjadi penentu dari keberlangsungan suatu instansi. Peranannya yang berhubungan langsung dengan publik, menjadi sebuah hal yang berpengaruh terhadap instansi yang dikelolanya. Dengan adanya kepercayaan publik, suatu instansi dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan.

Kepercayaan publik akan terus meningkat ketika suatu instansi mendapatkan sebuah penghargaan yang dijadikan sebagai pengakuan atas kinerja dari instansi tersebut. Dari penghargaan yang didapatkan, instansi akan semakin dikenal oleh publik, dan menciptakan kepercayaan bagi para *stakeholdersnya*.

Dengan adanya peran humas yang dapat mengelola komunikasi dengan internal maupun eksternalnya dengan baik, diharapkan suatu instansi dapat terus berkembang dengan baik, sehingga manfaat yang diberikan oleh instansi bisa turut dirasakan oleh publiknya. Hal ini yang menjadi harapan dari setiap praktisi humas.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Berdasarkan jenis data yang digunakan, pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap narasumber dan merangkum informasi yang didapatkan dari sumber dalam bentuk kata-kata. Menurut Strauss dan Corbin (1990), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian dimana prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik (Salim dan Sahrum, 2012, p. 41).

Dalam suatu pendekatan penelitian, terdapat lima karakteristik yang harus ada untuk dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah, diantaranya yaitu terbuka (dapat diakses oleh siapa saja), objektif (terdapat fakta yang sesuai), empiris (berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan), sistematis (sesuai dengan kaidah penelitian), dan prediktif (memperkirakan apa yang terjadi di masa depan dengan melihat masalah di masa kini) (Morissan, 2012, p. 6). Data-data yang didapatkan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif ini diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan terhadap objek penelitian, dan

dokumen-dokumen yang mendukung penelitian. Menurut Ibnu Hajar (1996) menjelaskan bahwa dari segi hasil penelitian yang disajikan, penelitian kualitatif adalah menyajikan hasilnya dalam bentuk deskripsi naratif (Salim dan Sahrum, Op.cit., 44).

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi sosial tertentu. Dimana pada penelitian deskriptif ini akan dilakukan pengamatan yang bersifat ilmiah.

Metode deskriptif sendiri merupakan metode yang didalamnya meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, dan suatu peristiwa yang terjadi di masa sekarang (Ratnasari, Rahmat, and Prastowo 2018). Pemahaman ini dapat diperoleh ketika penulis telah menganalisis dan memahami fenomena yang akan diteliti hingga menarik satu kesimpulan dari data yang telah diperoleh di lapangan.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi mengenai peran humas BPK RI dalam meraih penghargaan *best of government* pada ajang *Public Relations Award 2020* dan mencari hasil dari fenomena yang diteliti mengenai peran humas dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan narasumber.

### **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini, peneliti melakukan Wawancara langsung dengan *key informan* dan *informan*. Untuk itu peneliti menetapkan lokasi penelitian di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, tepatnya pada bagian Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Internasional, yang berlokasi di Menara Tujuh, lantai 5, Kantor Pusat BPK, Jl. Gatot Soebroto No 31, Jakarta Pusat. Penelitian ini akan dilakukan secara langsung dengan *key informan* dan *informan* yang telah ditetapkan mengenai peran humas yang dilakukan untuk mendapatkan penghargaan *best of government*. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Mei hingga bulan Juli 2021.

### **3.3. Subjek Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil beberapa subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber untuk mendapatkan informasi mengenai fenomena yang peneliti ingin teliti. Menurut Hendarsono dalam Suyanto (2005:171-172), *informan* dalam penelitian meliputi tiga macam yaitu Informan kunci (*key informan*) yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian, Informan utama yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, *Informan* tambahan yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat

dalam interaksi sosial yang diteliti (Sondak et al., 2019, p. 674). Untuk itu, penulis menetapkan *key informan* dan *informan* dalam penelitian ini yaitu :

a. *Key informan*

Pada penelitian ini, penulis menetapkan keyinforman atau informan kunci adalah Ibu Trisari Istiati selaku Kepala Subbagian Publikasi dan Media BPK RI

b. *Informan*

Informan yang penulis tetapkan dalam penelitian ini yaitu Ibu Bestantia Indraswati selaku Pranata Hubungan Masyarakat Muda BPK RI dan Bapak Rihad Wiranto selaku Pemimpin Redaksi Teropong Senayan

### **3.4. Teknik Keabsahan Data**

Menurut Sugiyono (2012:241) Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Pratiwi, 2017, p. 213). Triangulasi sendiri memiliki tiga macam cara dalam pengecekan data, yaitu sumber, teknik, dan waktu.

#### **1. Triangulasi Sumber**

Menurut Patton (Moloeng, 2007:330) bahwa Triangulasi sumber merupakan cara membandingkan dan mengecek balik derajat

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Pratiwi, 2017, p. 213).

## 2. Triangulasi Teknik

Menurut Sugiyono (2016:274), Triangulasi teknik merupakan cara menguji kredibilitas dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Pratiwi, 2017, p. 214).

## 3. Triangulasi Waktu

Menurut Sugiyono (2016:274). Triangulasi waktu merupakan menguji kredibilitas dengan melakukan pengecekan dengan observasi, wawancara, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda (Pratiwi, 2017, p. 214).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, dimana peneliti membandingkan hasil wawancara *key informan* dan *informan* dengan data yang telah didapatkan.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan penelitian. Dengan adanya data-data yang faktual dan akurat, akan menunjang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Data-data yang diperoleh bersumber dari berbagai macam teknik yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data yang akurat.

Ada berbagai teknik pengumpulan data yang bisa dilakukan diantaranya yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti juga dapat memanfaatkan sumber atau data yang ada untuk dijadikan sebagai penunjang dalam melakukan penelitian.

### **3.5.1. Sumber Data Primer**

Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-lain (Ahyar et al., 2020, p. 247). Data primer yang didapatkan oleh penulis didapatkan dari wawancara dengan key informan dan informan.

#### **3.5.1.1. Wawancara Mendalam**

Wawancara mendalam merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara lisan dengan dua orang atau lebih secara tatap muka guna mendapatkan tanggapan atau pendapatnya terhadap suatu obyek (Soegijono 1993). Tujuan dari melakukan wawancara ini yaitu untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber terpercaya yang memiliki keterkaitan dengan variabel yang ingin peneliti teliti. Dalam melakukan wawancara, peneliti akan menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik dari penelitian yang diambil.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian mengenai peran humas di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan langsung datang ke gedung pusat BPK RI untuk mewawancarai *key informan* dan *informan* yang telah ditetapkan.

### **3.5.2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka (Ahyar et al., 2020, p. 247). Data sekunder yang didapatkan oleh peneliti yaitu berupa dokumentasi dan studi pustaka.

#### **3.5.2.1. Dokumentasi**

Menurut Moleong (1990:161) pada dasarnya semua dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian, dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan meramalkan data. Dalam mengkaji isi dari sebuah dokumen biasanya memanfaatkan catatan, arsip, gambar, film, foto, dan dokumen-dokumen lainnya. Menurut Ratna (2010:234) sumber penelitian berupa dokumen terbagi menjadi 3, yaitu :

1. tulisan, seperti buku, majalah, biografi, catatan harian, surat-surat pribadi, surat wasiat, surat kabar, notulen rapat, prasasti, dan sebagainya



2. Gambar dan lambang, seperti foto, peta, lukisan, film, tanda tangan, dan sebagainya
3. Monumen, seperti patung, benteng, candi, pura, dan sebagainya.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumen untuk memenuhi berbagai data yang dibutuhkan, dokumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu dokumen visual berupa gambar (Dr. Farida Nugrahani, 2014, pp. 143–144).

#### **3.5.2.2. Studi Pustaka**

Studi pustaka atau kepustakaan menurut Zed (2003:3) merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Supriyadi, 2017, p. 85). Dengan adanya studi pustaka ini, peneliti bisa mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan untuk melengkapi data-data yang ada.

Studi pustaka yang didapatkan peneliti dalam penelitian ini yaitu berupa dokumentasi langsung yang diberikan oleh *key informan* dan *informan* serta berasal dari *website* resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah melakukan pengumpulan data adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari berbagai metode yang dilakukan seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Dalam penelitian kualitatif, data yang disajikan berbentuk kata-kata bukan angka seperti pada penelitian kuantitatif. Menurut Moleong (1989:103) analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Salim dan Sahrum, Op.cit., p 145).

Analisis menurut Miles dan Huberman (1992) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (1) reduksi data (*data reduction*); (2) penyajian data (*data display*); dan (3) penarikan simpulan (Ahyar et al., Op.cit., p. 163).

#### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, reduksi data akan berlangsung terus-menerus selama peneliti melakukan pengumpulan data. Sehingga data-data yang diperoleh akan terus bertambah hingga penelitian yang dilakukan peneliti selesai. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan,

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Ahyar et al., 2020, p. 164)

## 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan (Ahyar et al., 2020, p. 167). Dimana penulis akan menyusun informasi yang sudah didapatkan, kemudian akan memberi kemungkinan untuk dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan (Rijali 2019). Pada tahap penyajian data ini bertujuan bagi peneliti untuk memahami peristiwa yang terjadi dan dapat merencanakan kerja atau tahap selanjutnya berdasarkan apa yang sudah peneliti pahami.

## 3. *Conclusion Drawing* (Penarikan Simpulan)

Pada tahap penarikan simpulan, peneliti akan memberikan simpulan awal yang bersifat sementara hingga peneliti dapat menemukan bukti-bukti yang dapat mendukung tahap selanjutnya hingga menemukan simpulan akhir. Simpulan yang ada perlu didukung oleh bukti-bukti yang *valid* agar menjadi simpulan yang kredibel. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya

atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif (Ahyar et al., 2020, p. 171).

### **3.7. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti masih terdapat keterbatasan atau hambatan yang ditemukan di lapangan, diantaranya yaitu :

1. Penelitian ini hanya menggunakan teori tentang peran humas tanpa menyertakan fungsi dari humas sehingga cakupan informasi yang didapatkan kurang luas
2. Peneliti tidak menggunakan pengumpulan data berupa observasi, sehingga peneliti tidak dapat melihat secara langsung peran humas yang dilakukan oleh subyek penelitian
3. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data berupa studi pustaka, namun informasi yang tersedia di media sosial BPK RI maupun Teropong Senayan masih kurang cukup

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Obyek Penelitian**

##### **4.1.1. Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)**

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 di dalam Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946, dijelaskan pada 1 Januari 1947 Badan Pemeriksa Keuangan dibentuk dan berkedudukan sementara dikota Magelang (*Sejarah BPK RI*, n.d.). Lebih dari 70 tahun Badan Pemeriksa Keuangan telah berjasa dalam memeriksa dan mengawasi keuangan di Indonesia. Bertujuan dalam mengelola tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat, BPK RI juga berusaha dalam menjadi instansi pemerintah yang transparan kepada publik terkait dengan laporan hasil pemeriksaan.

Dalam hal transparansi, BPK RI mempercayakan Biro Humas yang bertugas menyampaikan informasi kepada publik secara terbuka. Sejauh ini, Humas BPK RI telah menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga humas pemerintah. Dimana Humas BPK RI berperan dalam perumusan rencana kegiatan Biro Humas, mempersiapkan perumusan kebijakan di bidang kehumasan, melakukan kebijakan di bidang kehumasan dan kerja

sama internasional, membuat laporan kegiatan yang sudah dilaporkan dan disetujui oleh Sekretaris Jendral.

Humas BPK RI juga turut mengadakan program-program, dengan tujuan untuk mendekatkan instansi BPK RI dengan publik dan juga media. Program yang dijalankan pun beragam, mulai dari *BPK Goes to Campus/School*, sosialisasi BPK bersama dengan Asosiasi Profesi/Akademisi/Organisasi Masyarakat, *media gathering*, *media visit*, pelaksanaan konferensi pers, publikasi siaran pers, publikasi hasil pemeriksaan dan capaian BPK melalui majalah Warta Pemeriksa dan Warta Pemeriksa digital berbasis *website*.

Dalam meraih penghargaan *best of government* ini, kinerja humas BPK pun menjadi penilaian, dalam hal penyampaian informasi yang transparan dan sikap yang terbuka dengan publik dan media. Tercapainya penghargaan ini turut menjadi saksi bahwa humas BPK RI telah menjalankan perannya dalam hal menyampaikan informasi secara terbuka dengan memanfaatkan program-program yang telah dirumuskan pada setiap tahunnya.

Menurut Huselid (dalam Sajuyigbeet al 2013:28) penghargaan diartikan sebagai sebuah sistem yang memberikan kontribusi terhadap kinerja dengan menghubungkan kepentingan karyawan kepada mereka yang

berasal dari tim dan organisasi, sehingga meningkatkan usaha dan kinerja (Prabu & Wijayanti, 2016, p. 107). Penghargaan yang didapatkan BPK RI, merupakan penghargaan pertama yang didapatkan dari ajang *Teropong Public Relations Award 2020*. Penghargaan dengan kategori *best of government* ini, ditujukan untuk instansi pemerintahan yang dinilai baik melalui berbagai aspek penilaian yang telah ditetapkan para juri.

Instansi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah dilakukan pemantauan oleh para juri di ajang *Teropong Public Relations Award* selama 12 bulan terakhir. Selama 12 bulan terakhir itu, para juri melihat bagaimana pemberitaan mengenai instansi BPK RI, apakah pemberitaan yang ada cenderung positif atau justru negatif. Para juri juga turut melihat bagaimana seluruh komponen BPK RI termasuk biro Hubungan Masyarakat dalam menjalin hubungan baik dengan publik dan media untuk memberikan informasi yang terbuka dan transparan.

Penilaian yang dilakukan ini, tidak hanya berasal dari team Teropong Senayan, melainkan Teropong Senayan juga menggandeng para juri yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing untuk turut serta dalam penilaian pada kategori *best of government* ini. Para juri yang turut andil dalam penilaian ini yaitu Meutya Viada Hafid (Anggota DPR RI Ketua Komisi I), Rizka Septiana (Wakil Ketua Perhumas), serta Jojo S Nugroho (Ketua Umum Asosiasi Public Relation Indonesia) (Alamsyah, 2020).

#### **4.1.2. Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia**

**Visi** : Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara

**Misi** : Misi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya (*Visi Misi BPK RI, n.d.*).

#### **4.1.3. Profil Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama International**

##### **Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan dalam



Pasal 22, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Humas dan Kerja Sama Internasional dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK
2. Perumusan rencana kegiatan Biro Humas dan Kerja Sama Internasional berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Humas dan Kerja Sama Internasional
3. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kehumasan dan kerja sama internasional
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang kehumasan dan kerja sama internasional
5. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas Biro Humas dan Kerja Sama Internasionalp
6. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional; dan
7. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal (*Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, n.d.*).

#### 4.2. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, penulis telah mewawancarai 1 orang keyinforman dan 2 orang informan secara online melalui aplikasi *zoom meeting* dan *WhatsApp*. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Pengumpulan data dengan metode studi pustaka telah dilakukan sejak awal penulis menyusun data yang telah disusun pada bab sebelumnya. Kemudian tahap wawancara mendalam dan dokumentasi dilakukan secara online. Tahap wawancara mendalam ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada para narasumber, antara lain :

Tabel 1 *Keyinforman*

No	Nama	Jabatan
1.	Trisari Istiati	Kepala Subbagian Publikasi dan Media BPK RI

Tabel 2 *Informan*

No	Nama	Jabatan
1.	Bestantia Indraswati	Pranata Hubungan Masyarakat Muda BPK RI

2.	Rihad Wiranto	Pemimpin Redaksi Teropong Senayan
----	---------------	-----------------------------------

Proses wawancara yang dilakukan kepada narasumber Trisari Istiati sebagai *keyinforman* yang dilakukan pada hari Jumat, 18 Juni 2021 pukul 14.00 WIB melalui aplikasi *zoom meeting* dan pada hari Senin, 26 Juli 2021 melalui *whatsApp*. Wawancara juga dilakukan kepada narasumber Bestantia Indraswati sebagai informan I yang dilakukan pada hari Jumat, 18 Juni 2021 14.00 WIB melalui aplikasi *zoom meeting* dan dilanjutkan dengan pemberian informasi tambahan melalui *whatsapp* pada hari Selasa, 22 Juni 2021. Penulis juga melakukan wawancara kepada narasumber Rihad Wiranto sebagai informan II yang dilakukan pada hari Senin, 21 Juni 2021 melalui aplikasi *zoom meeting*.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, humas BPK RI memaparkan bagaimana peranan yang dilakukan untuk mendapatkan penghargaan *best of government* pada ajang *Teropong Public Relations Award 2020*. Data-data yang didapatkan juga turut dibantu dengan metode studi pustaka yang didapatkan dari *website* Badan Pemeriksa Keuangan dan metode dokumentasi yang didapatkan dari *live streaming* ajang *Teropong Public Relations Award 2020*. Semua data yang telah didapatkan, diuraikan berdasarkan dimensi, sebagai berikut :

## 4.2.1. Peran Humas Dalam Meraih Penghargaan *Best of Government*

### 4.2.1.1. Peran *Expert Prescriber*

Trisari Istiati selaku Kepala Subbagian Publikasi dan Media BPK RI menjelaskan peran yang dilakukan oleh Humas BPK RI sebagai *expert prescriber* untuk meraih penghargaan *best of government* di ajang *Teropong Public Relations Award* sebagai berikut :

“Pada biro humas BPK RI, kami berperan dalam membantu manajemen untuk memecahkan masalah, memberikan solusi, merumuskan kegiatan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, hanya untuk pengambilan keputusan, semuanya berada di tangan Pimpinan BPK dan Sekjen sehingga kami tidak turut serta. Namun kami turut serta dalam mengembangkan program-program yang ada di BPK, dimana kami berperan dalam merencanakan program tersebut, membuat proposal kegiatan, serta melaksanakan program yang telah dirumuskan. Program yang telah dilakukan juga akan dibuat laporannya untuk disampaikan ke Sekjen sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai biro humas dalam melaksanakan program” (Trisari Istiati, 26 Juli 2021).

Kemudian menurut Bestantia Indraswati selaku Pranata Hubungan Masyarakat Muda BPK RI mengenai peran *expert prescriber* yang dijalankan humas BPK RI sebagai berikut :

”Kami di biro humas memang menjalankan peran dalam mendefinisikan masalah yang muncul dalam kelembagaan kami, dan untuk membantu mendefinisikan masalah itu kami memanfaatkan E-PPID yang ada di *website* BPK. Jadi kami hanya membantu merumuskan masalah, memberikan jalan tengah yang diinginkan organisasi dan publik, namun keputusan tetap pada Pimpinan dan Sekjen.” (Bestantia Indraswati, 18 Juni 2021).

Selanjutnya dikatakan juga oleh Rihad Wiranto selaku Pemimpin Redaksi Teropong Senayan mengenai peran *expert prescriber* di Biro Humas BPK RI sebagai berikut :

“Dalam proses penilaian, humas BPK RI dapat memecahkan masalah dengan baik, mereka sigap dalam merespon masalah yang muncul, sehingga langsung dilakukan hal-hal untuk mengatasi masalah tersebut.” (Rihad Wiranto, 21 Juni 2021).

Dari ketiga pandangan yang diberikan dari para narasumber, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam memenuhi komponen penilaian pada penghargaan *best of government* ini, humas BPK RI berperan dalam membantu manajemen dalam memecahkan suatu masalah dengan memberikan solusi dan menyampaikan masalah yang disampaikan khalayak untuk BPK, namun tidak secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan, karena semua keputusan berada di Pimpinan BPK RI dan Sekretaris Jendral. Pimpinan dan Sekretaris Jendral yang berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan turut memberikan ide-ide dalam menyelesaikan masalah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa humas BPK RI tidak menjalankan peranan sebagai *expert prescriber*.

#### **4.2.1.2. Peran Fasilitator Komunikasi**

Trisari Istiati selaku Kepala Subbagian Publikasi dan Media BPK RI menjelaskan mengenai fasilitator komunikasi yang diperankan oleh humas

BPK RI dalam meraih penghargaan *best of government* di ajang *Teropong Public Relations Award* sebagai berikut :

“Kami sebagai Biro Humas berperan untuk dapat menjadi penghubung antara organisasi dengan publik. Publik dapat menyampaikan kritik, saran, masukan, aspirasinya untuk kelembagaan BPK melalui E-PPID, dan semua prosesnya Biro Humas yang mengurus. Jadi ketika ada masukan dari publik, kita rumuskan kemudian kita sampaikan ke satuan kerja terkait untuk ditentukan solusinya seperti apa, selanjutnya kami akan menyampaikan lagi respon yang disampaikan oleh Satuan Kerja terkait ke publik yang menyampaikan aspirasinya. Respon yang diberikan ini untuk menciptakan rasa keterbukaan antara publik dan kelembagaan BPK, sehingga publik dapat memahami penjelasan yang diberikan oleh Satuan Kerja terkait mengenai masalah yang diadukan.” (Trisari Istiati, 26 Juli 2021).

Kemudian juga dikatakan oleh Bestantia Indraswati selaku Pranata Hubungan Masyarakat Muda BPK RI mengenai peran fasilitator komunikasi yang dijalankan humas BPK RI sebagai berikut :

“Kami memanfaatkan E-PPID yang tersedia di website BPK RI, untuk berhubungan langsung dengan publik. Dari E-PPID itu kami dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh publik terkait dengan kelembagaan kami. Dari masukan-masukan yang kami terima, itu akan kami proses untuk disampaikan ke Satuan Kerja terkait.” (Bestantia Indraswati, 18 Juni 2021).

Selanjutnya dikatakan juga oleh Rihad Wiranto selaku Pemimpin Redaksi *Teropong Senayan* mengenai peran fasilitator komunikasi di Biro Humas BPK RI sebagai berikut :

“Secara umum, BPK RI sendiri sudah memenuhi kriteria penilaian yang telah dilakukan, Humas BPK RI juga berusaha untuk memberikan informasi yang transparan kepada publiknya dan sukses dalam menghubungkan organisasinya dengan publik.” (Rihad Wiranto, 21 Juni 2021).

Dari ketiga pendapat narasumber diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam memenuhi komponen penilaian pada penghargaan *best of government*, humas BPK RI menjalankan peranan fasilitator komunikasi, dimana dalam hal ini, humas BPK RI menjadi mediator antara organisasi dan publiknya, humas BPK RI menggunakan E-PPID yang ada di *website* BPK RI. E-PPID sendiri merupakan sebuah wadah pengaduan yang ditujukan untuk publik dapat menyampaikan saran dan masukan kepada BPK RI. Humas BPK RI juga memanfaatkan E-PPID ini untuk dapat bersikap transparan kepada publiknya, dengan memberikan respon-respon yang disampaikan oleh Satuan Kerja terkait dengan terbuka kepada publik.

#### **4.2.1.3. Peran Fasilitator Pemecah Masalah**

Trisari Istiati selaku Kepala Subbagian Publikasi dan Media BPK RI menjelaskan terkait fasilitator pemecah masalah yang jalankan oleh Humas BPK RI dalam meraih penghargaan *best of government* di ajang *Teropong Public Relations Award* sebagai berikut :

“Karena kami turut mengelola fasilitas E-PPID, yang mana pengaduan dari publik berasal dari situ, jadi kami turut dalam mendefinisikan masalah dan membantu manajemen untuk mencari solusi. Ketika dalam kelembagaan BPK RI terjadi suatu masalah, humas berperan aktif untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Tidak hanya humas, namun jajaran Pimpinan dan Sekjen pun turut serta dalam mencari solusi dari permasalahan yang terjadi dalam kelembagaan BPK RI.” (Trisari Istiati, 26 Juli 2021).

Kemudian juga dikatakan oleh Bestantia Indraswati selaku Pranata Hubungan Masyarakat Muda BPK RI mengenai peran fasilitator pemecah masalah yang dijalankan humas BPK RI sebagai berikut :

“Dalam biro humas kami semua turut serta dalam memecahkan suatu permasalahan yang muncul dalam kelembagaan kami. Kami membantu dalam merumuskan solusi atau jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Biasanya kami akan merumuskan masalahnya terlebih dahulu, kemudian mengambil langkah-langkah seperti mengadakan *press conference* untuk memberikan penjelasan terkait masalah tersebut kepada media dan masyarakat. Setelah itu melakukan evaluasi untuk melihat keberhasilan dari solusi yang dijalankan.” (Bestantia Indraswati, 18 Juni 2021).

Selanjutnya dikatakan juga oleh Rihad Wiranto selaku Pemimpin Redaksi Teropong Senayan mengenai peran fasilitator pemecah masalah di Biro Humas BPK RI sebagai berikut :

“Dalam pengungkapan kasus-kasus hukum, BPK RI juga terlibat di dalamnya, jadi BPK RI termasuk instansi yang terbuka dengan masyarakat dan humas BPK RI juga membantu berperan dalam memecahkan masalah yang dihadapi kelembagaan BPK RI, dan masalah yang hadir pun dapat diselesaikan dengan baik.” (Rihad Wiranto pada 21 Juni 2021).

Dari ketiga pandangan yang diberikan oleh para narasumber, penulis menyimpulkan bahwa dalam memenuhi komponen penilaian pada penghargaan *best of government*, humas BPK RI secara aktif berperan sebagai fasilitator pemecah masalah bersama dengan Pimpinan dan Sekretaris Jendral BPK RI. Humas berperan dalam membantu memecahkan suatu masalah yang hadir dalam kelembagaan BPK RI. Dalam menjalankan peranan ini, humas BPK RI merumuskan masalah yang muncul dari



pengaduan-pengaduan yang ada di E-PPID, kemudian dirumuskan bersama dengan Satuan Kerja terkait solusi atau strategi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

#### **4.2.1.4. Peran Teknisi Komunikasi**

Trisari Istiati selaku Kepala Subbagian Publikasi dan Media BPK RI menjelaskan mengenai peran teknisi komunikasi di Biro Humas BPK RI guna untuk meraih penghargaan *best of government* di ajang *Teropong Public Relations Award* sebagai berikut :

“Kami di Biro Humas aktif dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Dalam melaksanakan kegiatan itu, kami akan buat dulu perencanaannya kemudian dibuat proposal kegiatan untuk disampaikan ke Kepala Biro Humas dan Sekjen. Dalam setiap program yang dijalankan, kami berperan penuh dalam terselenggaranya kegiatan tersebut. Kegiatan yang sudah terlaksana oleh Humas BPK RI sendiri ada bermacam-macam, mulai dari workshop, seminar, lomba-lomba, dan kegiatan lainnya. Kami juga berperan dalam menjalin hubungan baik dengan media, dan yang Biro Humas lakukan untuk lebih dekat dengan media yaitu dengan menjalankan kegiatan seperti *media workshop*, *media visit*, *ataupun coffee morning*. Dalam kegiatan *coffee morning* ini, kami juga menyampaikan hasil pemeriksaan BPK secara transparan, dan memang untuk produk BPK yaitu laporan hasil pemeriksaan itu dapat diakses dengan mudah oleh publik sebagai bentuk transparansi.” (Trisari Istiati, 26 Juli 2021).

Kemudian menurut Bestantia Indraswati selaku Pranata Hubungan Masyarakat Muda BPK RI terkait teknisi komunikasi yang dijalankan humas BPK RI sebagai berikut :

“Peran kami sebagai Biro Humas memang aktif dalam pelaksanaan sebuah kegiatan, dalam merumuskan kegiatannya, membuat

anggaran, membuat proposal kegiatan, hingga pada pelaksanaan program kami turut andil secara aktif mengurus program tersebut. Di Biro Humas juga setiap harinya ada monitoring berita untuk mengetahui pemberitaan terkait BPK RI. Monitoring berita ini juga dibarengi dengan kegiatan-kegiatan yang sering Humas lakukan agar menciptakan kedekatan antara media dengan instansi BPK. Media juga dapat mengirimkan permohonan wawancara dengan mudah melalui E-PPID.” (Bestantia Indraswati pada 18 Juni 2021).

Selanjutnya dikatakan juga oleh Rihad Wiranto selaku Pemimpin Redaksi Teropong Senayan mengenai peran teknisi komunikasi di Biro Humas BPK RI sebagai berikut :

“Humas BPK RI juga berusaha untuk memberikan informasi yang transparan kepada publiknya, dan sukses dalam menghubungkan organisasinya dengan publik. Selain itu sikap dari pada pimpinan BPK RI dan Biro Humas kepada wartawan juga relatif mudah jadi tidak ada upaya untuk menyembunyikan”. (Rihad Wiranto pada 21 Juni 2021).

Dari ketiga pendapat yang dikemukakan oleh para narasumber, penulis menyimpulkan bahwa dalam memenuhi komponen penilaian pada penghargaan *best of government*, Humas BPK RI berperan sebagai teknisi komunikasi. Humas berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPK RI, dimana humas sangat berperan saat pelaksanaan kegiatan tersebut. Humas BPK RI juga berhasil menjalankan peran ini dengan menjalin hubungan baik dengan media dan mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung itu diantaranya *media workshop*, *media visit*, *ataupun coffee morning*. Humas BPK RI juga dapat menyediakan saluran komunikasi yang terbuka untuk media yaitu dengan fasilitas E-PPID. Laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI pun dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat,

sehingga hal ini yang mencerminkan transparansi dalam kelembagaan BPK RI.

#### **4.3. Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang penulis lakukan dari website BPK RI dan wawancara daring melalui *zoom meeting* dan *WhatsApp*, penulis mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk diolah dalam penelitian ini. Dari hasil data yang telah terkumpul mengenai peran humas BPK RI dalam meraih penghargaan *best of government* pada ajang *Teropong Public Relations Award 2020*, penulis mengelompokkan peranan tersebut sesuai dengan tugas yang dilakukan oleh Humas BPK RI.

Dalam menentukan peranan humas yang dijalankan, penulis mengelompokkan beberapa peranan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dozier & Broom, diantaranya yaitu :

##### **4.3.1. *Expert Prescriber***

Memiliki fungsi dan tugas untuk dapat mendefinisikan masalah, memecahkan masalah, mengembangkan program, dan bertanggung jawab terhadap implementasinya. Biasanya dianggap sebagai pihak yang memiliki otoritas ketika ada sesuatu hal yang perlu ditangani.

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan penulis, humas BPK RI berupaya dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam kelembagaan BPK RI. Humas berperan untuk mendefinisikan masalah yang muncul, kemudian memberikan solusi atas masalah yang terjadi. Namun, dalam pengambilan keputusan humas tidak berperan di dalamnya, karena semua keputusan kembali kepada Pimpinan dan Sekretaris Jendral BPK RI. Humas hanya berperan untuk membantu memecahkan masalah yang ada tanpa ikut andil dapat pengambilan keputusan. Dalam proses pengembangan program, humas secara aktif ikut dalam pelaksanaannya. Humas juga selalu melaporkan hasil kegiatan yang dilakukan kepada Sekretaris Jendral.

Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam meraih penghargaan *best of government*, humas BPK RI tidak menjalankan peranan sebagai *expert prescriber*, dimana humas hanya ikut membantu Pimpinan dan Sekretaris Jendral dalam memecahkan suatu masalah, bukan turut andil secara aktif dalam pengambilan keputusan.

#### **4.3.2. Fasilitator Komunikasi**

Menjadi fasilitator komunikasi, diperlukan keahlian untuk dapat berperan sebagai sumber informasi dan dapat menjadi agen kontak resmi antara organisasi dan publiknya. Menjadi perantara antara organisasi dengan

publik maupun organisasi dengan lembaga lain merupakan tugas dari seorang fasilitator komunikasi.

Berdasarkan wawancara mendalam yang telah dilakukan penulis, humas BPK RI berperan dalam menjadi mediator atau penghubung antara publik dengan kelembagaan BPK. Dimana dalam menjalankan peranan ini, humas BPK memanfaatkan E-PPID untuk dapat berhubungan dan berkomunikasi langsung dengan publiknya. Di E-PPID ini, publik dapat menyampaikan saran, kritik, dan masukannya kepada BPK. Aspirasi yang masuk dalam E-PPID itu, dikelola langsung oleh humas BPK untuk disampaikan ke Satuan Kerja terkait. Nantinya aspirasi yang masuk akan dirumuskan solusinya seperti apa, kemudian humas akan dengan terbuka menyampaikan informasi kepada publik terkait jalan tengah yang dapat ditempuh dalam mengatasi masalah tersebut, tentunya setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan BPK dan Sekretaris Jendral, karena dalam kelembagaan BPK RI, segala persetujuan harus dilakukan secara berjenjang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam meraih penghargaan *best of government*, humas BPK RI menjalankan perannya sebagai fasilitator komunikasi, dengan menjadi mediator antara organisasi dengan publiknya.

### 4.3.3. Fasilitator Pemecah Masalah

Sebagai fasilitator pemecah masalah, tentunya hal yang harus dimiliki adalah keahlian dalam memecahkan berbagai masalah. Humas harus dapat menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi dalam suatu organisasi atau instansi.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan oleh penulis, humas BPK RI berperan untuk membantu manajemen dalam memecahkan masalah yang hadir dalam kelembagaan BPK. Humas memanfaatkan kritik, saran, masukan, pengaduan yang masuk di E-PPID yang ditujukan untuk kelembagaan BPK RI, untuk dapat mengetahui masalah antara publik dengan kelembagaan BPK RI. Setelah mendefinisikan masalah yang muncul, humas akan menyampaikan ke satuan kerja terkait untuk diproses dan dirumuskan solusi yang akan diambil seperti apa. Dalam hal ini humas turut berperan untuk memberikan ide/solusi dalam memecahkan masalah, namun humas tidak berperan secara aktif sebagai pengambil keputusan, karena semua keputusan berada ditangan Pimpinan BPK dan Sekretaris Jendral.

Dapat disimpulkan bahwa dalam memenuhi komponen penilaian yang ada pada penghargaan *best of government*, humas BPK RI menjalankan peranan sebagai fasilitator pemecah masalah dengan turut serta dalam

memberikan solusi dari suatu permasalahan namun tidak berperan aktif dalam mengambil keputusan.

#### **4.3.4. Teknisi Komunikasi**

Menjalankan peran sebagai teknisi komunikasi, diperlukan keahlian dalam komunikasi dan jurnalistik serta dapat mengimplementasikan suatu program yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan penulis, humas BPK berperan aktif dalam setiap program-program yang dilaksanakan BPK RI. Humas ikut serta dalam membuat perencanaan, memberikan ide, membuat proposal kegiatan, melaksanakan kegiatan, hingga melakukan evaluasi atas program yang telah dilaksanakan. Berbagai kegiatan atau program telah sukses dilaksanakan oleh humas BPK RI, diantaranya workshop, seminar, lomba-lomba yang tingkatnya sudah international, dan masih banyak lagi. Humas BPK RI juga berperan dalam menjalin hubungan dengan media untuk menciptakan keterbukaan antara media dengan kelembagaan BPK RI. Kegiatan yang humas lakukan untuk mendekati diri dengan media diantaranya *media workshop*, *media visit*, *coffee morning* yang berisi obrolan mengenai laporan hasil pemeriksaan. Dimana hasil laporan pemeriksaan ini juga dapat dengan mudah diakses oleh publik di *website*

BPK RI. Hal ini lah yang membuat humas BPK RI dikenal dengan sikap yang terbuka dan transparan oleh media maupun publik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa humas menjalankan peran sebagai teknisi komunikasi dalam memenuhi komponen penilaian yang ada pada penghargaan *best of government*, dimana humas BPK RI berupaya untuk menjalankan perannya dalam menjalin komunikasi yang baik dengan media dan publik untuk menciptakan keterbukaan atau transparansi.

#### 4.4. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk mengecek kembali hasil wawancara yang telah dilakukan oleh para narasumber yang berbeda. Dari triangulasi sumber ini, nantinya akan terlihat seberapa akurat data yang telah dikemukakan oleh para narasumber. Penulis akan mengetahui apakah data yang didapatkan antara masing-masing narasumber sudah selaras atau justru berbeda.

**Tabel 3 Tabulasi Perbandingan Hasil Wawancara Peran Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Meraih Penghargaan *Best of Government* pada Ajang Teropong *Public Relations Award 2020***

No	Konsep	Kategori	Akumulasi Hasil Pernyataan	Hasil Penelitian
----	--------	----------	-------------------------------	------------------



1.	Peran Humas menurut Dozier & Broom	<i>Expert Prescriber</i>	<p>Menurut <i>Key Informan</i>, Humas BPK RI tidak turut serta dalam pengambilan keputusan karena itu berada di tangan Pimpinan dan Sekretaris Jendral, jadi humas hanya membantu mencari solusi untuk memecahkan masalah.</p> <p>Menurut Informan I, humas BPK RI menjalankan peran dalam mendefinisikan masalah dengan memanfaatkan E-PPID, namun tidak berperan dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Menurut Informan II, humas BPK RI dapat</p>	<p>Humas BPK RI dalam meraih penghargaan <i>best of government</i> ini tidak menjalankan peran sebagai <i>expert prescriber</i>, karena Humas BPK RI tidak turut serta dengan aktif untuk menetapkan suatu keputusan. Dalam kelembagaan BPK RI, semua kegiatan perlu adanya persetujuan berjenjang, sehingga humas hanya berperan untuk membantu merumuskan tanpa ikut andil dalam mengambil</p>
----	------------------------------------	--------------------------	--	--

			memecahkan masalah dengan baik, terlihat dari sikap humas yang sigap dalam merespon masalah yang muncul, sehingga langsung dilakukan hal-hal untuk mengatasi masalah tersebut.	keputusan.
2.		Fasilitator komunikasi	Menurut <i>Key Informan</i> , Humas BPK RI berperan menjadi mediator antara publik dengan organisasinya. Dimana humas memanfaatkan E-PPID untuk menerima pengaduan dari masyarakat untuk disampaikan ke Satuan Kerja terkait.  Menurut Informan I, E-PPID memang digunakan humas	Humas BPK RI menjalankan peran sebagai fasilitator komunikasi dengan menjadi mediator antara publik dengan organisasi, dimana untuk membantu humas menjalankan peran ini, humas memanfaatkan E-PPID yang langsung dikelola oleh biro

			<p>BPK untuk menjalankan perannya menjadi mediator dengan media dan publik.</p> <p>Menurut Informan II, Humas BPK RI berhasil menjadi penghubung antara publik dengan organisasi maupun antara media dan organisasi.</p>	humas.
3.		Fasilitator pemecah masalah	<p>Menurut <i>Key Informan</i>, humas membantu dalam merumuskan masalah yang ada dalam kelembagaan BPK. Selain itu, humas juga berperan dalam mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut, namun tidak berperan dalam pengambilan keputusan.</p>	<p>Humas BPK RI dalam meraih penghargaan <i>best of government</i> ini, menjalankan peran sebagai fasilitator pemecah masalah, dimana humas BPK RI berperan untuk membantu</p>

			<p>Menurut Informan I, humas berperan dalam mendefinisikan masalah yang ada dalam kelembagaan BPK, kemudian merumuskan solusi yang tepat, kemudian menjalankan solusi yang sudah ditetapkan, kemudian melakukan evaluasi.</p> <p>Menurut Informan II, humas BPK RI juga membantu berperan dalam memecahkan masalah yang dihadapi kelembagaan BPK RI, dan masalah yang hadir pun dapat diselesaikan dengan baik.</p>	<p>manajemen dalam memecahkan suatu masalah, dimana humas ikut turut serta memberikan solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi, namun tidak berperan aktif dalam melakukan pengambilan keputusan.</p>
4.		Teknisi komunikasi	Menurut <i>Key informant</i> , humas	Dalam meraih penghargaan <i>best of</i>

			<p>BPK berperan aktif dalam menyelenggarakan program-program, dalam hal merencanakan program, membuat laporan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan melakukan evaluasi. Humas Juga berperan dalam menjalin komunikasi dengan media dan mengadakan kegiatan untuk mendukung hal tersebut.</p> <p>Menurut Informan I, Humas BPK berupaya untuk terlibat dalam setiap program yang diadakan, dan berperan aktif sebagai pelaksana</p>	<p><i>government, humas</i></p> <p>BPK RI menjalankan peran sebagai teknisi komunikasi dengan turut serta melaksanakan program-program yang ada di BPK dan turut menjalankan kegiatan yang bertujuan membuka akses dengan media seperti <i>media workshop, media visit, dan coffee morning.</i></p>
--	--	--	--	---

			<p>dan merumuskan ide-ide program. humas juga seringkali mengadakan kegiatan untuk membuka akses kepada media.</p> <p>Menurut Informan II, Humas BPK RI juga berusaha untuk memberikan informasi yang transparan kepada publiknya. Selain itu sikap dari pada pimpinan BPK RI dan Biro Humas kepada wartawan juga relatif mudah.</p>	
--	--	--	--	--

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai peran Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam meraih penghargaan *best of government* pada ajang *Teropong Public Relations Award 2020*, penulis menarik kesimpulan bahwa Humas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menjalankan peranan yang dirumuskan oleh Dozier & Broom dalam penelitian ini.

1. Dalam meraih penghargaan *best of government*, humas BPK RI tidak menjalankan peran sebagai *expert prescriber*, karena seluruh keputusan berada di tangan Sekretaris Jendral dan Pimpinan BPK. Ketika BPK mengalami suatu masalah, tidak hanya humas yang berperan aktif, melainkan Pimpinan dan Sekretaris jendral turut andil dalam hal tersebut.
2. Dalam meraih penghargaan *best of government*, humas BPK RI menjalankan peran sebagai fasilitator komunikasi dengan menjadi mediator antara organisasi dengan publiknya dan memanfaatkan fasilitasi E-PPID untuk berhubungan dengan publik dan media.

3. Dalam meraih penghargaan *best of government*, humas BPK RI berperan sebagai fasilitator pemecah masalah, dimana Kepala Biro Humas dan jajarannya berperan aktif dalam menyelesaikan suatu masalah, memberikan solusi, dan menjalankan solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
4. Dalam meraih penghargaan *best of government*, menjalankan peran sebagai teknisi komunikasi, dalam hal ini, humas berperan sebagai pelaksana dalam setiap kegiatan. Humas juga berperan dalam menciptakan keterbukaan dengan media dan publik, dengan menjalankan kegiatan seperti *media workshop*, *media visit*, dan *coffee morning* untuk membuka akses dengan media, dan menciptakan transparansi.

## **5.2. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian selanjutnya yaitu :

1. Meningkatkan interaksi sosial dengan informan untuk menanamkan rasa keterbukaan yang terjalin dalam mengumpulkan data
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang sejenis dengan teori yang berbeda agar memberikan gambaran yang berbeda pula



3. Untuk penelitian berikutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian dengan obyek penelitian berbeda namun sejenis agar memiliki perbandingan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti
4. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk dapat melakukan penelitian sejenis dengan pendekatan yang berbeda untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ahyar, Hardani, Universitas Sebelas Maret, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, M.Si. Hardani, S.Pd., Grad. Cert. Biotech Nur Hikmatul Auliya, et al. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Cutlip, Scott M. *Effective Public Relations*. 9th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Nugrahani, Farida. *Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Vol. 1. Solo: Cakra Books, 2014.
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT Kencana, 2012.
- Salim dan Sahrum. *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan*. Citapustaka Media, 2012.
- Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soegijono, MS,. 1993. "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data." *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan* 3(1):17–21. doi: 10.22435/mpk.v3i1.930.

Assumpta Rumanti, Sr Maria. *Dasar-Dasar Public Relations Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

**Jurnal :**

Prabu, Aldila Saga, and Dewie Tri Wijayanti. "Pengaruh Penghargaan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Divisi Penjualan PT. United Motors Center Suzuki Ahmad Yani, Surabaya)." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 5, no. 2 (2016): 104.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/296518354.pdf>.

Pratiwi, Nuning Indah. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no. 2 (2017): 202–224.  
<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/219>.

Rahayu, ira dwi. "Peran Humas Dalam Rangka Meningkatkan Citra Sekolah Di SMK YPKK 3 Sleman Yogyakarta" (n.d.): 12.  
<https://eprints.uny.ac.id/23252/1/SKRIPSI LENGKAP - IRA DWI RAHAYU.pdf>.

Rahmat, Jabal. "Peran Humas Dalam Menyebarkan Pembangunan Di Sektor Pariwisata Kabupaten Bantaeng" (2018): 50.  
[https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3237-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3237-Full_Text.pdf).

- Ratnasari, Eny, Agus Rahmat, and FX Ari Agung Prastowo. 2018. "Peran Humas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi." *PRofesi Humas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat* 3(1):21. doi: 10.24198/prh.v3i1.14034.
- Rijali, Ahmad. 2019. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17(33):81. doi: 10.18592/alhadharah.v17i33.2374.
- Sari, Wina Puspita, and Asep Soegiarto. "Peran Humas Di Lembaga Pendidikan." *communicology* 7 (2019): 52–62. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/communicology/article/view/11546/175>.
- Siswanto, Belinda Devi Larasati, and Firda Zulivia Abraham. "Peran Humas Pemerintah Sebagai Fasilitator Komunikasi Pada Biro Humas Pemprov Kalimantan Selatan." *Jurnal Penelitian Komunikasi* 19, no. 1 (2016): 55–68. <https://asset-pdf.scinapse.io/prod/2480790471/2480790471.pdf>.
- Sondak, Sandi Hesti, Rita N. Taroreh, and Yantje Uhing. "Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara." *EMBA* 7 (2019): 674. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/22478/22170>
- Supriyadi, Supriyadi. "Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan." *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu*

*Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan* 2, no. 2 (2017): 83.  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lpustaka/article/viewFile/13476/101>  
62.

**Website :**

Alamsyah, Ichsan Emerald. "BPK Terima Penghargaan Best of Government."  
*Republika.Co.Id*. Last modified 2020. Accessed April 23, 2021.  
<https://republika.co.id/berita//qiz1pi349/bpk-terima-penghargaan-best-of-government>.

*Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan*. (n.d.). Retrieved June 24, 2021, from  
[https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2019/06/file\\_storage\\_1561688687.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2019/06/file_storage_1561688687.pdf)

*Sejarah BPK RI*. (n.d.). Retrieved June 22, 2021, from  
<https://www.bpk.go.id/menu/sejarah>

*Visi Misi BPK RI*. (n.d.). Retrieved June 22, 2021, from  
[https://www.bpk.go.id/menu/visi\\_misi](https://www.bpk.go.id/menu/visi_misi)

## LAMPIRAN

**Lampiran 1****TRANSKRIP WAWANCARA KEY INFORMAN**

Hari dan tanggal : Jumat, 18 Juni 2021 dan Senin, 26 Juli 2021

Tempat : Daring via *Zoom Meeting* dan *Whatsapp*

Narasumber : Trisari Istiati S.Sos., M.M.

Jabatan : Kepala Subbagian Publikasi dan Media pada Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama International

Instansi : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Lama bertugas : 24 tahun

**Pertanyaan :**

1. Bagaimana peranan humas di BPK RI? Apakah peran yang dijalankan selama ini sudah sesuai sebagai lembaga humas pemerintah?

**Jawaban :** Di biro humas BPK RI sendiri, kami sudah menjalankan peranan yang sudah ditetapkan dalam melakukan perumusan rencana kegiatan Biro Humas, mempersiapkan perumusan kebijakan di bidang kehumasan, melakukan kebijakan di bidang kehumasan dan kerja sama internasional, membuat laporan kegiatan yang sudah dilakukan kepada Sekjen. Disamping itu, kami juga menjalin hubungan baik

dengan lembaga pemerintah, asosiasi profesi, dan media, dan karena ini kami juga telah berhasil menjalin MoU dengan beberapa pihak.

2. Sebagai humas BPK RI, apakah peran yang dilakukan hanya di bagian pelaksana dan merumuskan kegiatan saja? Atau turut serta dalam pengambilan keputusan dan aktif dalam menyelesaikan suatu masalah?

**Jawaban** : untuk bagian humas sendiri, kami ikut serta dalam melaksanakan kegiatan dan merumuskan kegiatan yang akan dilakukan, biasanya ini sudah ditetapkan setiap tahun kegiatannya apa saja. Namun untuk keputusan, semuanya berada di tangan Pimpinan dan Sekretaris Jendral, kami tetap ikut dalam menyelesaikan masalah, memberikan solusi dan merumuskan kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut, tapi untuk keputusan berada di Pimpinan dan Sekjen.

3. Posisi humas dalam struktur organisasi/manajerial berada di posisi mana? Apakah bertindak sebagai pelaksana atau turut serta secara aktif dalam mengambil keputusan?

**Jawaban** : Dalam struktur organisasi, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK berada di bawah Sekretariat Jenderal (dipimpin Sekretaris Jenderal). Keputusan yang diambil oleh Kepala Biro Humas



dilaporkan ke Sekjen dan diketahui oleh Sekjen. Dalam pelaksanaan program, Kepala Biro Humas menginstruksikan pejabat dan pelaksana di bawahnya untuk menjalankan program kerja yang sudah direncanakan. Sehingga Humas dapat berperan sebagai pelaksana untuk memberikan pelayanan informasi dan kehumasan pada publik, sekaligus pada jabatan tertinggi dapat mengambil keputusan sesuai wewenangnya.

4. Adakah kerjasama aktif antara humas dengan pihak manajerial dalam pengambilan keputusan? Atau justru salah satu pihak yang berperan aktif?

**Jawaban:** Dalam strukturnya, dalam Biro Humas ada pihak manajerial (dalam hal ini kepala subbagian, kepala bagian, dan kepala biro), serta pelaksana. Terdapat garis birokrasi dalam pelaksanaan peran, tugas, dan program humas sehari-hari. Sehingga sudah pasti terdapat kerjasama aktif dalam internal humas sendiri, juga kerjasama aktif dengan satuan kerja di luar humas baik di BPK Pusat maupun BPK Perwakilan. Keputusan yang diambil oleh Kepala Biro Humas, diketahui oleh Sekjen. Sehingga peran aktif dijalankan secara bersama dalam garis birokrasi yang sesuai dengan struktur dan aturan yang berlaku di BPK.

5. Program-program apa saja yang dilakukan humas BPK RI dalam rangka pemberian informasi kepada publik?

**Jawaban :** Masing-masing Subbagian di Humas memiliki berbagai program untuk memberikan informasi pada publik. Pelayanan informasi dan kehumasan dilakukan untuk publik, antara lain: pelayanan permintaan informasi dan pengaduan masyarakat melalui E-PPID, pelayanan permintaan Laporan Hasil Pemeriksaan melalui E-PPID, informasi BPK (berita, kegiatan, majalah, bahan publikasi lain) melalui website BPK, tayangan pemberitaan kegiatan pimpinan BPK melalui media sosial BPK (*youtube, instagram, twitter, facebook*), media workshop tentang hasil pemeriksaan BPK, pertemuan dengan media dalam kegiatan *coffee morning, media gathering, media visit*, pelaksanaan konferensi pers, publikasi siaran pers, publikasi hasil pemeriksaan dan capaian BPK melalui majalah Warta Pemeriksa dan Warta Pemeriksa digital berbasis website, kegiatan Hubungan Antar Lembaga (*BPK Goes to Campus/School, Sosialisasi/Seminar/Audiensi BPK bersama dengan Asosiasi Profesi/Akademisi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, Penerimaan Permohonan Magang/Penelitian/Praktik Kerja Lapangan*), kegiatan kerja sama dan hubungan dengan BPK negara lain.

6. Apakah dalam pengembangan program humas BPK RI terlibat didalamnya? Dan bagaimana proses yang terjalin?

**Jawaban** : tentunya kami terlibat dalam pengembangan program yang telah direncanakan pada awal tahun, dimana kami bertindak untuk membuat perencanaan dan anggaran kegiatan. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, humas akan membuat terlebih dahulu proposal kegiatannya kemudian disampaikan ke Kepala Biro Humas untuk mendapatkan persetujuan, kemudian selanjutnya akan disampaikan juga ke Sekjen, karena dalam melaksanakan program, kami perlu ada persetujuan secara berjenjang. Untuk proses pengembangan program, kami akan lakukan perencanaan program terlebih dahulu kemudian menyusun proposal, lalu melaksanakan rapat perencanaan dan persiapan kegiatan, melihat tren di lingkungan atau isu publik yang sedang berkembang, lalu melaksanakan program, dan melakukan evaluasi.

7. Dalam mengembangkan program ini, apakah ketika program tersebut sudah berjalan, humas BPK RI dapat bertanggung jawab atas implementasi yang telah diberikan?

**Jawaban** : bentuk tanggung jawab kami terhadap implementasi program yang sudah dijalankan dengan membuat laporan pasca kegiatan untuk disampaikan ke Sekretaris Jendral. Dari laporan ini nantinya juga akan ada evaluasi untuk mengukur keberhasilan program yang sudah dilaksanakan.

8. Siapakah yang berperan penting dalam kontribusi meraih penghargaan *best of government* ini?

**Jawaban** : Kontribusi dari seluruh pelaksana dan pejabat struktural di humas BPK. Masing-masing subbagian memiliki tugas, program tersendiri yang semuanya dikemas dalam berbagai format komunikasi dengan pesan yang sama. Utamanya untuk mewujudkan akuntabilitas untuk semua, akuntabilitas yang menjadi budaya bersama. Selain itu, sebagai wujud nyata BPK memberi manfaat bagi masyarakat.

9. Ketika dalam kelembagaan BPK terjadi suatu masalah, apakah humas ikut serta dalam memecahkan masalah tersebut?

**Jawaban** : kami sebagai humas turut membantu dalam memecahkan masalah, namun untuk keputusan yang diambil, itu berada di tangan Sekretaris Jendral dan Ketua BPK. Kami memanfaatkan kegiatan monitoring berita yang rutin dilakukan untuk melihat masalah yang

muncul, kami juga menggunakan E-PPID yang tersedia di website BPK untuk menerima pengaduan dari masyarakat. Sehingga disini humas berperan untuk membantu satuan kerja terkait dalam mendefinisikan masalah serta mencari jalan keluar dari masalah tersebut.

10. Dalam menjalin hubungan baik dengan publik, apakah humas BPK RI dapat berperan dalam menerima aspirasi dari masyarakat atau menjadi mediator antara organisasi dengan publiknya?

**Jawaban** : ya, kami sebagai humas memang berperan untuk itu, menjadi penghubung antara publik dengan kelembagaan BPK RI. Untuk membantu kami berhubungan dengan publik, terdapat fasilitas E-PPID yang berfungsi untuk menerima saran, masukan, pengaduan dari masyarakat untuk BPK RI. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ini, akan kami sampaikan juga ke satuan kerja untuk dirumuskan solusi yang akan diambil. Selanjutnya humas akan menerima respon dari satuan kerja terkait, kemudian respon tersebut akan disampaikan lagi kepada masyarakat. Sehingga disini humas berperan untuk menyampaikan aspirasi dari publik, kemudian menyampaikan kembali jalan keluar yang dirumuskan oleh organisasi kepada masyarakat.

11. Dalam proses pengambilan keputusan, apakah humas BPK RI turut andil dalam proses tersebut?

**Jawaban** : dalam proses pengambilan keputusan, Kepala Biro Humas hanya bertugas menjalankan kegiatan sesuai dengan arahan dari Sekretaris Jenderal dan Pimpinan BPK, sehingga semua keputusan kembali kepada Pimpinan ataupun Sekretaris Jenderal BPK RI dan Humas hanya berperan dalam menjalankan tugas yang telah disetujui atau diputuskan oleh Pimpinan atau Sekjen.

12. Dalam menyampaikan informasi kepada publik, apakah sebelum melakukan publikasi, dilakukan penyeleksian informasi terlebih dahulu? Bagaimana humas dapat memberikan informasi yang transparan kepada publik?

**Jawaban** : tentunya kami akan menyeleksi terlebih dahulu informasi yang akan disampaikan kepada publik. Namun disamping itu, kami tetap menyampaikan setiap informasi yang berhubungan dengan kelembagaan BPK. Seperti laporan hasil pemeriksaan yang menjadi produk BPK RI, itu kami sampaikan juga kepada khalayak dan bisa dengan mudah diakses oleh publik di website BPK RI, tentunya hal ini dilakukan untuk menciptakan transparansi informasi.

13. Apa saja yang dilakukan humas BPK RI untuk menjalin hubungan baik dengan media, hingga tercipta kedekatan antara media dengan organisasi?

**Jawaban** : untuk menjalin hubungan baik, kami seingkali mengadakan program-program yang tujuannya untuk menciptakan kedekatan atau keterbukaan dengan media, program yang kami lakukan diantaranya pembuatan siaran pers, mengadakan konferensi pers terkait hasil pemeriksaan BPK, mengadakan *media workshop*, *media visit*, *coffee morning* menjelaskan hasil-hasil pemeriksaan maupun capaian organisasi BPK. Kami juga berupaya untuk memenuhi permohonan informasi ataupun wawancara yang diajukan oleh media yang dikirimkan melalui E-PPID.

14. Apakah dalam mengimplementasikan program, humas BPK RI menemukan kesulitan yang menghambat proses implementasi program tersebut? Apakah hambatan yang ada berpengaruh pada penghargaan *best of government* yang didapatkan?

**Jawaban** : Kesulitan yang kadang menghambat adalah adanya aturan permohonan persetujuan yang berjenjang sehingga membutuhkan waktu tertentu. Jika dikatakan hambatan ini berpengaruh pada

penghargaan *best of government*, sepertinya tidak, karena walaupun dibutuhkan permohonan berjenjang dalam melakukan suatu kegiatan, namun semua sudah berjalan dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan.

15. Apakah penghargaan *best of government* yang didapatkan, berpengaruh pada kinerja humas selanjutnya? Jika iya, adakah peran yang lebih ditingkatkan kembali?

**Jawaban** : tentunya ada pengaruh pada kinerja kami, pasti akan terus ditingkatkan kembali yang sudah baik perihal penyampaian informasi, hubungan dengan media dan kegiatan lainnya. Kedepannya kami di Biro Humas ingin mewujudkan digitalisasi karena sekarang teknologi semakin berkembang, sehingga kami ingin menerapkan digitalisasi yang sudah ada menjadi lebih berkembang lagi.

16. Apakah terdapat kesulitan yang dihadapi humas BPK RI dalam memenuhi komponen penilaian penghargaan *best of government*, seperti menjalin hubungan baik, menyampaikan informasi yang transparan dan efektif, kemudahan dalam akses informasi? Bagaimana mengatasinya?



**Jawaban** : untuk kesulitan sendiri sepertinya tidak ada yang sampai mempengaruhi, mungkin hanya kesulitan seperti harus adanya persetujuan berjenjang untuk mewujudkan suatu kegiatan atau dalam menyampaikan informasi. Namun kesulitan ini tidak terlalu berpengaruh, karena biro humas juga tetap dapat menyampaikan informasi kepada publik dengan transparan dan menyediakan fasilitas untuk publik atau media yang ingin berhubungan langsung dengan BPK RI untuk menyampaikan keluhan atau masalah yang mungkin dihadapi.

17. Bagaimana humas BPK RI bekerjasama dengan seluruh komponen untuk bisa kembali mendapatkan penghargaan lainnya di kemudian hari?

**Jawaban** : dari Biro Humas sendiri pastinya akan meningkatkan kinerja humas yang memang sudah baik. Kemudian pastinya akan *maintain* hubungan dengan para *stakeholder*, yang mana dari hubungan baik ini yang menjadikan terciptanya MoU dengan berbagai pihak.

**Lampiran 2****TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN I**

Hari dan tanggal : Jumat, 18 Juni 2021

Tempat : Daring via *Zoom Meeting*

Narasumber : Bestantia Indraswati S.IP., M.A.

Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Muda pada Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama International

Instansi : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Lama bertugas : 15 tahun

**Pertanyaan :**

1. Apakah peran humas BPK RI sudah sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai lembaga humas pemerintah?

**Jawaban** : saat ini Humas BPK RI sudah berjalan sesuai fungsi dan peran yang ada, dalam menyampaikan informasi kepada publik dengan terbuka, membina hubungan baik dengan media, maupun berhubungan baik dengan lembaga pemerintahan lainnya. Humas

BPK RI juga telah berhasil mengadakan MoU dengan beberapa instansi terkait.

2. Apa saja media yang digunakan BPK RI dalam menyampaikan informasi kepada publik? media apa yang paling efektif?

**Jawaban** : Media yang dipakai oleh BPK RI meliputi semua saluran komunikasi yaitu media konvensional, media sosial seperti *instagram*, *youtube*, *twitter*, *facebook*, warta digital, warta pemeriksa, dan media cetak (majalah) juga sudah ada. Terdapat juga nomor *whatsapp* khusus untuk publik bisa berhubungan dengan BPK RI. Untuk efektifitasnya dilihat dari informasi yang disampaikan ke *stakeholder*, jika *stakeholdernya* media, lebih efektif menggunakan media online. Jika informasi disampaikan ke instansi pemerintah dapat menyampaikan dengan majalah pemeriksa.

3. Bagaimana pengelolaan informasi sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat?

**Jawaban** : Di Biro humas sendiri terdapat bagian pengelolaan informasi, yang mana informasi yang ada akan di publikasi ke berbagai saluran komunikasi, media massa, perpustakaan, sub bagian layanan informasi yang nantinya informasi tersebut akan *publish* melalui

*website* dan medsos BPK RI. Untuk bisa diakses oleh publik, semuanya sudah dapat diakses dengan mudah oleh publik. Untuk informasi yang ada, nantinya akan dikelola sesuai dengan format informasinya. Misal pesan yang ingin disampaikan, ditujukan kepada mahasiswa, bentuk informasi yang disampaikan nantinya bisa berupa *BPK goes to campus*, pameran, dan lainnya. Sehingga semua tergantung bentuk pesan yang ingin disampaikan dan siapa publik yang akan menerima pesan tersebut.

4. Apakah terdapat kesulitan bagi humas BPK RI dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat? Bagaimana mengatasinya?

**Jawaban** : Kesulitannya yaitu harus adanya persetujuan secara berjenjang karena di lembaga pemerintah sendiri terdapat birokrasi. Khususnya jika informasi disampaikan ke media, itu harus adanya persetujuan berjenjang. Namun jika ke instansi pemerintah, penyampaian informasi sudah berkembang dengan baik sehingga bisa langsung disampaikan berupa surat ke instansi terkait. Sehingga penyampaian informasi tergantung dari informasi yang akan disampaikan seperti apa, namun informasi yang dikeluarkan harus secara berjenjang. Untuk mengatasinya hanya dengan mengikuti prosedur yang ada, jadi informasi yang akan disampaikan harus

medapatkan persetujuan yang berjenjang terlebih dahulu, jika sudah mendapatkan persetujuan, informasi akan bisa langsung dipublikasikan.

5. Apakah pesan yang disampaikan melalui sosial media berpengaruh pada tercapainya penghargaan *best of government*?

**Jawaban** : Untuk sejauh ini, peran BPK di media sosial sudah berjalan dengan baik. Jadi media sosial ini memang menjadi saluran komunikasi kami, dan informasi yang ingin disampaikan pun sudah tersampaikan dengan baik melalui media sosial, dan dari media sosial BPK RI sendiri sudah mendapat centang biru (*verified*) sehingga mungkin hal tersebut yang turut mempengaruhi kemenangan BPK RI di ajang *Teropong Public Relations Award* sebagai *best of government*.

6. Bagaimana humas BPK RI untuk dapat memecahkan yang ada dalam kelembagaan BPK RI?

**Jawaban** : Untuk memecahkan masalah, biasanya humas BPK akan menganalisis dulu masalahnya seperti apa, lalu dicari strategi yang tepat untuk mengatasi masalahnya, kemudian melakukan aksi, mungkin dengan melakukan penjelasan ke publik atau mengadakan

*press conference*, atau forum FGD, lalu humas akan melakukan monitoring lagi untuk memastikan apakah langkah yang diambil telah berhasil, setelah itu akan dilakukan evaluasi.

7. Bagaimana humas BPK RI dapat menjadi penghubung antara organisasi dengan publiknya?

**Jawaban** : untuk menjadi mediator atau dalam hal ini biasanya disebut perantara, kita memanfaatkan fasilitas E-PPID yang ada di *website* BPK RI. Jadi dari E-PPID itu, humas bisa mengetahui apa yang menjadi keluhan bagi publik terhadap BPK RI. Hal ini menjadi fasilitas untuk dapat berhubungan langsung dengan publik dan bisa memberikan solusi yang terbaik untuk publik.

8. Bagaimana humas BPK RI menciptakan informasi yang transparan dan efektif untuk masyarakat? Apakah sebelum mempublikasikan informasi, humas harus menyeleksi terlebih dahulu informasi yang akan disampaikan?

**Jawaban** : Humas BPK menyampaikan informasi terkait dengan kelembagaan BPK seperti memberikan informasi tentang kegiatan apa saja yang dilakukan BPK RI kepada masyarakat melalui saluran komunikasi yang dimiliki seperti *instagram, twitter, facebook, youtube*.

Sehingga dengan informasi rutin yang dilakukan humas BPK RI ini akan menciptakan keterbukaan dengan masyarakat. Sebelum melakukan publikasi, kami juga akan menyeleksi dulu informasi yang akan disampaikan sudah sesuai atau belum, sehingga publik juga dapat memahami dengan mudah isi pesan yang disampaikan.

9. Apakah penghargaan *best of government* yang didapatkan, berpengaruh pada kinerja humas selanjutnya? Jika iya, adakah peran yang lebih ditingkatkan kembali?

**Jawaban** : Otomatis jika sudah mendapatkan penghargaan dari pihak lain, pastinya akan ada berpengaruh pada kinerja humas untuk semakin terbuka dengan publik, dan membuka akses serta melayani informasi yang diminta. Untuk peran yang lebih ingin ditingkatkan yaitu mengenai digitalisasi PR.

10. Apakah terdapat kesulitan yang dihadapi humas BPK RI dalam memenuhi komponen penilaian penghargaan *best of government*, seperti menjalin hubungan baik, menyampaikan informasi yang transparan dan efektif, kemudahan dalam akses informasi? Bagaimana mengatasinya?

**Jawaban** : Untuk komponen penilaian ini, sudah semua dilakukan oleh humas BPK, sehingga tidak ada kesulitan yang terlalu mempengaruhi dalam memenuhi komponen penilaian tersebut. Tinggal di *maintain* terkait hubungan baik antara media dan BPK, maupun antara masyarakat dan BPK. Semuanya akses komunikasi pun sudah disediakan oleh BPK. Jika untuk transparansi juga sudah dilakukan oleh BPK, dimana seperti yang kita tahu bahwa produk BPK merupakan laporan hasil pemeriksaan, dari laporan hasil pemeriksaan ini, selama sudah disampaikan ke lembaga perwakilan berarti sudah terbuka untuk umum, itu juga sudah disebutkan dalam undang-undang BPK, dan sudah ada juga dasar hukumnya. Untuk keterbukaan, humas BPK juga sudah melakukan kegiatan dengan *stakeholder* seperti kegiatan sosialisasi, *BPK goes to campus*, dan beberapa kegiatan yang bentuknya lomba-lomba. Hal ini yang membuktikan bahwa BPK RI sudah terbuka dengan masyarakat umum.

11. Bagaimana humas BPK RI bekerjasama dengan seluruh komponen untuk bisa kembali mendapatkan penghargaan lainnya di kemudian hari?

**Jawaban** : Yang kami lakukan sebagai humas BPK yaitu meningkatkan kembali yang sudah ada, melakukan *maintain*



hubungan baik dengan *stakeholder*, dan menjalin beberapa kegiatan MoU. Semakin adanya sinergi dengan beberapa lembaga pemerintah ini, menjadi salah satu cara untuk menjaga penghargaan *best of government* yang telah didapatkan ini, dan untuk meraih penghargaan lainnya dikemudian hari.

## Lampiran 3

## TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN II

Hari dan tanggal : Senin, 21 Juni 2021

Tempat : Daring via *Zoom Meeting*

Narasumber : Rihad Wiranto

Jabatan : Pemimpin Redaksi / Penanggungjawab

Instansi : Teropong Senayan

**Pertanyaan :**

1. Dalam mengikuti ajang *Teropong Public Relations Award*, adakah tahapan yang perlu dilalui oleh para kandidat yang masuk ke dalam kategori penghargaan?

**Jawaban :** untuk ajang *Teropong Public Relations Award* ini posisinya pasif. Maksud dari pasif disini adalah posisi penilaian yang dilakukan 100% ada ditangan juri dan team yang ada di Teropong Senayan, sehingga untuk para kandidat pemenang tidak ada tahapan yang perlu dilalui, karena para juri pun menilai keseluruhan dari instansi pemerintah yang ada. Untuk proses penilaian kategori *best of government* ini dilihat dari 12 bulan atau 1 tahun kinerja dari instansi pemerintah terkait.

Prosesnya yaitu ada dari team Teropong Senayan yang mengamati pemberitaan dari instansi pemerintahan tersebut, lalu dikoordinasikan kepada juri pada akhir setelah team Teropong Senayan telah melakukan survei, selanjutnya baru menentukan pemenang dari penghargaan kategori *best of government*.

2. Apa saja komponen penilaian yang dilakukan untuk menentukan pemenang dari penghargaan *best of government*?

**Jawaban** : setiap penghargaan yang diberikan ada indikator yang berbeda-beda. Khusus untuk kategori *best of government* ini, dilihat dari bagaimana kementerian atau instansi pemerintah dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat secara transparan dan efektif, selanjutnya dapat terbuka dengan media, kemudian transparan dan kemudahan dalam akses informasi. Di BPK RI sendiri, untuk mendapatkan informasi atau akses informasi sudah baik dan cukup memudahkan.

3. Berapa lama penilaian yang dilakukan dalam menentukan pemenang dari penghargaan kategori *best of government*?

**Jawaban** : penilaian yang dilakukan selama 12 bulan atau 1 tahun terakhir. Dari 12 bulan survei itu dilihat juga pemberitaan terkait instansi tersebut bagaimana, kemudian dilihat dari apakah instansi tersebut

memenuhi semua komponen penilaian yang telah ditentukan oleh team Teropong Senayan dan para juri.

4. Bagaimana BPK RI bisa mengikuti ajang *Teropong Public Relations Award* ini?

**Jawaban** : karena posisi peserta pasif jadi memang tidak diberitahukan selama proses penilaian. Posisi BPK RI diberitahukan ini setelah proses penentuan oleh juri. Proses BPK RI bisa mengikuti ajang ini karena telah dilakukan penilaian selama 12 bulan terhadap instansi BPK dan BPK dianggap layak untuk memenangkan kategori *best of government* pada ajang ini, jadi tidak ada tahapan yang harus BPK RI atau instansi lain lalui terlebih dahulu.

5. Komponen apa yang paling menonjol dari BPK RI sehingga dapat memenangkan penghargaan *best of government* ini?

**Jawaban** : secara umum, BPK RI sendiri sudah memenuhi kriteria penilaian yang telah dilakukan, dan dianggap menonjol dari instansi lainnya. Mulai dari penyampaian informasi yang transparan hingga berhubungan baik dengan media, itu sudah dijalankan BPK RI dengan baik. Selain itu, humas BPK RI juga sudah dapat memecahkan masalah

dengan baik, menjalankan program-program rutin, dan menjadi perantara dengan publiknya.

6. Dalam memenangkan penghargaan *best of government* ini, adakah hal yang membedakan BPK RI dengan kedua instansi lain yang turut memenangkan penghargaan ini?

**Jawaban :** memang ada hal-hal yang menonjol dari instansi-instansi yang memenangkan kategori ini yaitu Kominfo dan Polri. Dari Polri sendiri terdapat aspek digital, dimana dalam peran PR, digital ini sangat diperlukan. Kemudian dari Kominfo, mereka gencar untuk menyampaikan informasi dan responsif terutama menjawab *hoax*. Lalu jika BPK RI sendiri, hal yang menonjol dari BPK RI yaitu adanya transparansi di dalam hasil pemeriksaan, seperti yang disampaikan juga oleh DPR, BPK ini sangat terbuka, kemudian dalam pengungkapan kasus-kasus hukum, BPK RI juga terlibat, jadi BPK RI termasuk instansi yang terbuka dengan masyarakat dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi dengan baik. Humas BPK RI juga berusaha untuk memberikan informasi yang transparan kepada publiknya. Selain itu sikap dari pada pimpinan BPK RI kepada wartawan juga relatif mudah jadi tidak ada upaya untuk menyembunyikan.

7. Menurut anda, apakah humas BPK RI merupakan pemegang peran utama yang berperan dalam memenangkan penghargaan *best of government* ini? bagaimana peranan yang dilakukan?

**Jawaban :** Peran humas merupakan salah satunya yang berperan dalam memenangkan penghargaan *best of government*. Artinya, sikap dari ketua BPK RI dan ketua-ketua terkait, kemudian personil-personil dibawahnya memang cukup terbuka dengan publik. Dalam hal ini humas berperan untuk dapat menjadi perantara antara BPK RI dengan publiknya. Saya kira ini kerjasama yang baik juga, jadi tidak hanya bergantung pada humas, tapi juga ketua BPK RI yang secara langsung terlibat dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat atau bagian dari kehumasan secara keseluruhan.

8. Dalam melakukan penilaian penghargaan *best of government* ini kepada BPK RI, apakah para juri menemukan kekurangan yang dimiliki oleh humas BPK RI?

**Jawaban :** pada proses penilaian, kami dari team Teropong Senayan dan para juri tidak fokus pada kekurangan instansi tersebut, karena posisi kami juga tidak untuk memberikan masukan kepada BPK RI. Namun secara umum, humas BPK RI sudah sangat baik dalam menjalankan peranannya.

9. Menurut anda, untuk instansi pemerintah BPK RI, adakah yang perlu ditingkatkan kembali setelah tercapainya penghargaan *best of government* ini?

**Jawaban** : untuk BPK RI sendiri sejauh ini sudah cukup baik untuk menjalankan fungsinya. Jika dari pendapatan saya pribadi, BPK RI bisa lebih mengembangkan digitalisasi yang memudahkan masyarakat dalam berhubungan langsung dengan BPK, dan fasilitas ini pun sudah dimiliki BPK RI, jadi kedepannya untuk digitalisasi bisa dikembangkan untuk fasilitas-fasilitas lainnya.

10. Menurut anda, apa perbedaan humas BPK RI dengan humas instansi lain yang membawa BPK RI dapat memenangkan penghargaan *Best Of Government* ini?

**Jawaban** : saya lihat umumnya humas pemerintah memiliki cara kerja yang mirip, mungkin karena mereka memiliki standar operational yang relatif beragam, jadi tidak ada perbedaan yang menonjol. Namun dalam menjalankan peranannya, humas BPK RI sudah berperan dengan cukup baik.

## Lampiran 4

### BUKTI WAWANCARA

#### BPK RI (KEY INFORMAN & INFORMAN I)



#### TEROPONG SENAYAN (INFORMAN II)










## Lampiran 5

Nama : Novianti Mutiara Putri      Program Studi D-III Hubungan Masyarakat

NIM : 1408518085

Pembimbing : Asep Soegiarto

No	Tanggal Bimbingan	Materi Konsultasi	Catatan Materi Konsultasi	Paraf
1	19 April 2021	Membuat Judul penelitian beserta BAB 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Judul penelitian belum terdapat masalah yang ingin diteliti</li> <li>- Latar belakang tidak perlu terlalu banyak teori</li> <li>- Bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian</li> </ul>	
2	26 April 2021	Revisi BAB 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Latar belakang sudah cukup</li> <li>- Masalah yang diteliti sudah ada</li> <li>- Manfaat penelitian untuk akademis perlu direvisi</li> <li>- Gambar di latar belakang diberikan sumber</li> </ul>	
3	3 Mei 2021	BAB 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Judul di italic yang bahasa asing</li> <li>- Tidak perlu mencantumkan citra</li> <li>- Judul "mencapai" diganti menjadi "meraih"</li> <li>- BAB 2 ditambahkan pembahasan tentang <i>best of government</i></li> </ul>	
4	17 Mei 2021	Revisi BAB 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan spasi 2</li> <li>- Mulai menggunakan mendeley</li> <li>- Teori komunikasi dikurangi</li> <li>- Teori komunikasi dikaitkan dengan kehumasan</li> <li>- Nama acara di-italic</li> <li>- Tambahkan tentang kandidat penghargaan <i>best of government</i></li> </ul>	
5	25 Mei 2021	Lanjut draft wawancara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ganti sub bab di BAB 2 sesuai dengan pedoman TAKI</li> <li>- Bedakan pendekatan, metode, dan jenis</li> <li>- Menghapus "kalibrasi" dalam teknik keabsahan data</li> <li>- Membuat draft wawancara</li> </ul>	

6	31 Mei 2021	Revisi draft wawancara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisi draft wawancara sesuai dengan variabel dan indikator</li> <li>- Membuat draft wawancara dari pertanyaan yang umum ke yang khusus</li> </ul>	
7	7 Juni 2021	Revisi draft wawancara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengurangi pertanyaan yang umum</li> <li>- Melengkapi data keyinforman dan informan</li> </ul>	
8	14 Juni 2021	Konsultasi draft wawancara dan persiapan turun lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Draft wawancara teropong senayan lebih ditanyakan secara umum dan tidak teoritis</li> <li>- Melakukan turun lapangan</li> <li>- Buat bab 4 dan 5</li> </ul>	
9	29 Juni 2021	BAB 4 dan BAB 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kutipan wawancara menggunakan 1 spasi</li> <li>- Tabulasi hasil wawancara dibuat rangkuman</li> <li>- Kesimpulan sesuaikan dengan Tujuan penelitian di bab 1</li> <li>- Saran dikurangi</li> </ul>	
10	1 Juli 2021	BAB 4 dan BAB 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengurangi kutipan wawancara, gunakan esensinya saja</li> <li>- Lengkapi TAKInya</li> </ul>	
11	5 Juli 2021	Kelengkapan TAKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TAKI Lengkap</li> </ul>	

**Lampiran 6****RIWAYAT HIDUP**

Nama : Novianti Mutiara Putri

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 24 November 2000

No. registrasi : 1408518085

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Perumahan Duta Bintaro cluster Nusa Dua Blok  
F 16 No 6, Kelurahan Kunciran, Kecamatan  
Pinang, Kota Tangerang.

No. Telp : 082213222540

Email : [noviantimutiaraaaa@gmail.com](mailto:noviantimutiaraaaa@gmail.com)

**Latar Belakang Pendidikan :**

2006 – 2012 SD Yadika 3

2012 – 2015 SMP Yadika 5

2015 – 2018 SMA Yadika 5

2018 – 2021D-III Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta